



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH  
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI VII DPR RI DENGAN PT PLN  
PERSERO**

Tahun Sidang	:	2021-2022
Masa Persidangan	:	IV
Rapat ke-	:	...
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	:	Tertutup
Hari, Tanggal	:	Senin, 21 Maret 2022
Waktu	:	Pukul 16.45 s.d.19.45 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi VII DPR RI, Gedung Nusantara 1, Jakarta
Ketua Rapat	:	Sugeng Suparwoto (F.P-Nasdem/Wakil Ketua Komisi VII DPR RI)
Sekretaris Rapat	:	Dra. Nanik Herry Murti/Kabagset. Komisi VII DPR RI
Acara	:	1. Kendala dan Tantangan Sistem Kelistrikan Tahun 2022 2. Proses Kerja Sama Pembangkit Listrik EBT 3. Dampak Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2021 tentang PLTS Atap 4. Potensi Kerugian PLN Dengan Kenaikan Harga Batubara di Pasar Global 5. Lain-lain (menyampaikan RKP Tahun 2022)
Hadir	:	29 orang anggota hadir dari 53 orang Anggota Komisi VII DPR RI dengan rincian sebagai berikut:

**A. Anggota DPR RI:**

**PIMPINAN :**

1. Sugeng Suparwoto/F.P-Nasdem/Ketua Komisi VII DPR RI
2. Dony Maryadi Oekon/F.PDI Perjuangan/ Wakil Ketua Komisi VII DPR RI
3. Maman Abdurrahman, S.T./F.P-Golkar/Wakil Ketua Komisi VII DPR RI
4. Bambang Haryadi, S.E./F.P-Gerindra/Wakil Ketua Komisi VII DPR RI
5. H. Eddy Soeparno, S.H., M.H.

**1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA  
PERJUANGAN:**

7 orang anggota dari 11 anggota:

1. H. Yulian Gunhar, S.H., M.H.

2. H. Nasyirul Falah Amru, S.E.
3. Mercy Chriesty Barends, S.T.
4. Adian YUnus Yusak Napitupu
5. Dr. Ir. Willy Midel Yoseph, M.M.
6. Paramitha Widya Kusuma, S.E.
7. Novri Omposunggu

**2. FRAKSI PARTAI GOLKAR:**

3 orang anggota dari 7 anggota:

1. Drs. Mukhtarudin
2. H. Hasnuryadi Sulaiman, S.E., M.A.B.
3. Bambang Patijaya, S.E., M.M.

**3. FRAKSI PARTAI GERINDRA:**

2 orang anggota dari 6 anggota:

1. Ramson Siagian
2. H. Iwan Kurniawan, S.E.

**4. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT:**

2 orang anggota dari 4 anggota:

1. Arkanata Akram, S.T., B.E (Hons)., M.Eng.Sc.
2. Rico Sia

**5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:**

2 orang anggota dari 6 anggota:

1. H. Abdul Kadir Karding, S.Pi., M.Si.
2. H. Marwan Ja'far

**6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:**

4 orang anggota dari 5 anggota:

1. Sartono Hutomo
2. Muhammad Nasir
3. Zulfikar Hamonangan, S.H.
4. Drs. Hendrik H. Sitompul., M.M.

**7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:**

3 orang anggota dari 5 anggota:

1. Ir. H. Tifatul Sembiring
2. H. Nurhasan Zaidi, S.Sos.I.
3. Dipl. Ing Hj. Diah Nurwitasari, MI.Pol.

**8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:**

1 orang anggota dari 3 anggota:

1. Dr. Ir. Hj. Andi Yuliani Paris, M.Sc.

**9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:**

0 orang anggota dari 1 anggota:

## **B. PEMERINTAH/UNDANGAN**

1. Direktur Utama PT PLN Persero (Darmawan Prasodjo)
2. Direksi PT PLN Persero (Wiluyo)
3. Direksi PT PLN Persero (Adi)
4. Direksi PT PLN Persero (Haryanto)
5. Direksi PT PLN Persero (Hartanto)

### **JALANNYA RAPAT :**

#### **KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-P.NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Baiklah, Bapak/Ibu Anggota Komisi VII yang terhormat, dan juga Mitra kami dari jajaran PLN (Perusahaan Listrik Negara)

Hadir sudah Pak Dirut dengan sejumlah jajarannya yang hari ini telah siap untuk kita melakukan rapat dengar pendapat.

*Bismillahirrahmanirrahim.*

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Salam sejahtera bagi kita semuanya.

*Om swastiastu.*

*Namo buddhaya.*

Salam kebajikan.

Yang kami hormati Pimpinan Komisi VII DPR RI, ada di, juga di *virtual*. Tadi ada lengkap Pak Dony Oekoen ada, Pak Maman ada,

Dan juga yang kami hormati Anggota Komisi VII DPR RI, baik yang hadir fisik ya, semua hadir fisik ya, baik, tapi yang langsung di ruangan ini, maupun melalui *virtual*,

Yang kami hormati juga, Direktur Utama PT PLN, Persero beserta jajarannya, serta

Hadirin yang berbahagia,

Kita semuanya bersyukur, kita *alhamdulillah* sehat walafiat, dan ini Omicron terus melandai, meskipun Pak Nasir masih a, e, a, e, tapi itu bukan berarti kena. Nah ini lah, gitu ya. Jadi kita semuanya bersyukur sehat walafiat. Kita juga bersyukur, sebagai negara bangsa. Kita kemarin menyelenggarakan *event* internasional yang sangat sukses menurut saya. Jadi kita melakukan, menyelenggarakan apa, MotoGP dan syukur, bersyukur juga tidak ada mati listrik di sana kan. Prestasi PLN juga. Bayangkan kalau terjadi mati listrik, misalnya.

Iya, jadi Bapak/Ibu sekalian,

Hari ini sesuai undangan yang telah disampaikan bahwa, berdasarkan jadwal Komisi VII DPR RI pada Masa Persidangan IV, pada hari ini Komisi VII

akan melaksanakan Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama PLN dalam rangka pelaksanaan tugas fungsi pengawasan, dengan agenda:

1. Kendala dan tantangan sistem kelistrikan di tahun 2022.

Ini kompleks sekali saya kira, ini nanti juga bisa dikemukakan mungkin *highlight-highlight*-nya saja. Karena kita sepakat Bapak/Ibu yang terhormat, nanti akan diperpanjang di FGD-FGD yang akan segera diselenggarakan dalam waktu dekat.

2. Proses kerjasama pembangkit listrik EBT.

Sebagaimana kita tahu Bapak/Ibu sekalian, PLN berkomitmen betul akan juga masuk energi *clean and renewable energy*, di mana salah satunya adalah program dedieselisasi, dan sekarang sudah masuk dengan EBT, mengingat diesel selain polutif, penyumbang karbon dan juga metan, tetapi juga dia sangat mahal.

3. Dampak Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2021 tentang PLTS Atap.
4. Potensi kerugian PLN dengan kenaikan harga batubara di pasar global, dan
5. Lain-lain.

Bapak/Ibu sekalian,

Dari catatan sekretariat, Anggota Komisi VII DPR RI yang hadir sejumlah 18 anggota dari 8 fraksi. Dengan demikian, kuorum sebagaimana ditentukan dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, khususnya Pasal 281 ayat (1) telah terpenuhi. Dan sesuai ketentuan Pasal 276 menyatakan bahwa setiap rapat DPR bersifat terbuka kecuali dinyatakan tertutup.

Bapak/Ibu sekalian,

Oleh karena itu, pimpinan meminta persetujuan anggota, bahwa rapat dengar pendapat ini sesuai dengan ketentuan protokol kesehatan dan nah ini menjadi perhatian kita semuanya Bapak/Ibu sekalian, mengingat materi yang akan dibahas bersifat konfidensial, banyak hal sifatnya konfidensial, maka rapat kali ini, saya selaku pimpinan sidang minta persetujuan untuk dilakukan secara tertutup. Begitu?

**F-P.DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR, S.H.):**

Terbuka saja, Ketua.

**KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-P.NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Kalau terbuka nanti nggak konfidensial.

**F-P.DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR, S.H.):**

Nggak ada ang perlu ditutupin, Ketua.

**KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-P.NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Iya, namanya nggak ada konfidensial, Pak.

**F-P.DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR, S.H.):**

Iya.

**KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-P.NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Sudahlah, kali ini saya minta dengan hormat Pak Nasir, kita tertutup saja.

**ANGGOTA KOMISI VII DPR RI:**

Iyalah, bolehlah. Kali-kali kita ikut Ketua ya.

**F-P.DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR, S.H.):**

Saya kali ini ikut Ketua lah.

**ANGGOTA KOMISI VII DPR RI:**

Nah, gitu Pak Nasir ya.

**F-P.DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR, S.H.):**

Asal barang ini bisa diatur Ketua ya kan?

**KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-P.NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Nah ini lah, kadang-kadang. Iya, jadi setuju Bapak/Ibu sekalian ya? Dilakukan secara tertutup.

Bapak/Ibu sekalian yang terhormat,

Atas persetujuan anggota dan dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim*, rapat dengar pendapat Komisi VII DPR RI dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum.

**(RAPAT : SETUJU)**

Baiklah, sebelum lanjutkan rapat ini, kami minta persetujuan Bapak/Ibu sekalian bahwa rapat ini selesai paling lama adalah selama 2 jam. Jadi kalau kita mulai tadi adalah pukul 17.45 WIB, eh maaf, 16.45 WIB, maka *insya Allah* selesai pada 18.45 WIB atau katakanlah 18.00 WIB, nanti kita sesuaikan dengan memang itu waktu maghrib.

Baiklah, sebelum lanjutkan rapat perlu kami beritahukan bahwa ada anggota baru dari Fraksi Partai Demokrat atas nama Bapak Hendrik H Sitompul, beliaunya, nih Pak Dirut dan segenap jajaran PLN, beliau adalah dari Dapil Sumut 1. Bahwa beliau menggantikan yang terhormat almarhum Wahab Dalimunthe. Kita ingat beliau Pak Wahab Dalimunthe adalah, waktu itu adalah selaku Anggota DPR-MPR paling usia lanjut, sehingga memimpin sidang pertama MPR waktu itu. *Innalillahiwainnailaihirojjun* Pak Wahab Dalimunthe, semoga diterima dengan tenang di sisi Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*. Jadi yang menggantikan adalah Bapak Hendrik H Sitompul dari Dapil Sumut 1.

Baiklah, Bapak/Ibu sekalian,

Kami persilakan PLN mengemukakan banyak hal. Kita tahu selaku operator-operator pembangkit dan transmisi serta distribusi listrik sangat memiliki hubungan strategis Komisi VII dengan PLN sudah barang tentu, dan kita ketahui PLN saat ini sedang menghadapi sejumlah tantangan, sebagaimana juga menjadi materi hari ini, yakni kendala-kendala bagaimana memproyeksikan, menyelesaikan proyek mega listrik 35.000 megawatt di satu sisi, yang itu adalah sebagian besar adalah fosil energinya, sebut saja PLTU batubara, dan juga itu yang mengakibatkan sampai hari ini masih terjadi *oversupply*, hingga mencapai target *National Determine Contribution* atau NDC sampai 202030. Sebagaimana kita tetapkan untuk mengurangi sampai 29% karbon kita dengan kerja sendiri, dengan prakarsa internasional, bantuan internasional sampai 41%.

Selanjutnya saat ini PLN juga nampak kita sepakat bagaimana tercermin juga di RUPTL, dan terlebih-lebih kita sama-sama dengan PLN sepakat, kita akan segera menyelesaikan RUU Energi Baru Terbarukan yang sudah melalui harmonisasi dan pembulatan di Baleg, dan akan segera masuk di Komisi VII kembali minggu depan ini. Maka, menampak betul bahwa PLN juga membuktikan seriusnya untuk membangun pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan, ditengah-tengah dilema sebagaimana apa, saya kemukakan tadi, ada program 35.000 megawatt yang sampai tahun 2030-an akan naik kembali kurang lebih 13 giga masih yang tersisa.

Dan Bapak/Ibu sekalian,

Pembangunan pembangkit berbasis EBT ini sudah barang tentu akan berkontribusi untuk meningkatkan rasio elektrifikasi di Indonesia juga. Dan juga untuk mewujudkan ini, tentunya PLN akan menjalin kerjasama dengan pengembang yang bergerak di bidang penyediaan tenaga listrik dari EBT.

Oleh karena itu, Komisi VII DPR RI ingin mendapat penjelasan dari Direktur Utama PLN terkait proses kerjasama pembangkit listrik EBT ini.

Apakah masih dengan sebagaimana mekanisme lama dengan ITP atau PTI dan sebagainya, sebagainya.

Baiklah, selanjutnya juga Komisi VII mencatat bahwa PLN, kami ingin mendapatkan juga penjelasan dari PLN terkait dengan potensi kerugian PLN dengan harga batubara yang demikian tinggi di pasar global. Kita bersyukur, kita semuanya kompak, baik pemerintah, pelaku usaha di batubara, maupun kami di DPR, kita sempat mengikat dalam bentuk *domestic market obligation*, bahkan dalam ketentuan itu segera sepakat dengan pemerintah. GMO kita naikkan dari 25% menjadi 30% dengan PLN tetap membayar dengan harga 70 dolar per ton. Nah ini sebuah upaya, sehingga tidak terjadi gejolak, dinamika, bahkan kalau bisa terjadi sebagaimana minyak goreng yang mestinya juga di DMO saja itu CPO, kita produsen DPO terbesar di dunia, tetapi hari ini malah justru kita ada *problem* persoalan minyak goreng untuk rakyat.

Demikian, beberapa hal menjadi catatan kami, untuk itu kami mempersilakan Dirut PLN, nanti ditambah oleh yang lain untuk menambahkan.

Dipersilakan Pak Dirut.

**DIREKTUR UTAMA PT PLN PERSERO (DARMAWAN PRASODJO):**

*Bismillahirrahmanirohim,  
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,  
Selamat sore,  
Salam sejahtera,  
Om swastiastu,  
Namo buddhaya,  
Salam kebajikan,*

Burung garuda berdiri tegak,  
Kepakkan sayap maju ke depan,  
Kami ke Senayan untuk menghadap,  
Memohon perkenan, dan mohon arahan.

Yang terhormat para Pimpinan, Ketua Komisi VII DPR RI,  
Pak Ketua Sugeng, Pak Sugeng Suparwoto,  
Pak Eddy Soeparno,  
Pak Maman,  
Pak Bambang Haryadi,  
Pak Dony Oekon,  
Yang kami hormati pula, seluruh Anggota Komisi VII DPR RI.

Pada siang hari ini kami memenuhi panggilan dari DPR RI dalam rapat dengar pendapat. Dalam agenda ini, kami akan menyampaikan beberapa hal, sebagaimana diminta oleh DPR RI, antara lain:

1. Kendala dan tantangan sistem kelistrikan tahun 2022.
2. Proses kerjasama pembangkit listrik EBT.
3. Dampak Permen ESDM No 26 Tahun 2021 tentang PLTS Atap.
4. Potensi kerugian PLN dengan kenaikan harga batubara, dan juga

## 5. Progress rencana kerja prioritas PLN tahun 2022.

Untuk itu kami mohon memulai dari topik yang pertama, yaitu kendala dan tantangan sistem kelistrikan tahun 2022. Lanjut.

Kalau kita melihat realisasi *demand* di tahun 2021, itu adalah, ini yang realisasi yang warna hijau itu, itu sekitar 250 TWh, ini yang warna hijau. Itu adalah realisasi di tahun 2021. Tetapi, sesuai dengan RUPTL antara tahun 2015 sampai tahun 2024, *demand* kelistrikan seharusnya 361 TWh. Di Tahun 2014 akhir, asumsi pertumbuhan *demand* listrik adalah 8,7% per tahun, dan berbasis pada asumsi itu, maka dihitung bahwa *demand* listrik di tahun 2021 harusnya 361 TWh, di tahun 2022 adalah 392 TWh dan lain-lain.

Nah untuk itu, ternyata realisasi pertumbuhan *demand* listrik di tahun 2015 bukan 8,7 tetapi hanya 4,5%. Tetapi kontrak-kontrak dari pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, baik itu pembangkit transmisi distribusi, masih mengacu pada 361 TWh di tahun 2021. Maka, ditandatangani kontrak-kontrak yang saat ini menyebabkan aset-aset PLN menjadi *underutilized*, yang kita sebut dengan namanya *oversupply*.

Jadi kalau kita melihat realisasi di tahun 2021 adalah 255 TWh, sedangkan seharusnya 361 TWh, maka ada selisih sekitar 100 terrawatt *hour*, dan itu lah yang kita sebut dengan *oversupply*. Lanjut.

Kalau kita melihat bahwa bauran 23% EBT itu diumumkan pada tahun 2016, di saat itu lah mengacu pada RUPTL 2015 sampai 2024. Nah kalau kita mengacu di sana, kita lihat, bahwa sudah ada perbedaan karena adanya pergeseran, keterlambatan dari pertumbuhan *demand*, target 361 yang seharusnya tercapai di tahun 2025 ternyata mundur menjadi di tahun 2028. Artinya ada kemunduran 3 tahun. Tetapi di saat yang sama, kontrak-kontrak, terutama dengan pembangkit yang berbasis pada *fossil fuel*, baik itu berbasis batubara, maupun berbasis gas, dan lain-lain, sudah *kebanjur* ditandatangani.

23% ini adalah bauran, adalah persen. Artinya apa? Setiap 1 gigawatt, pembangkit berbasis pada batubara, harus diimbangi sekitar 300 megawatt EBT agar baurannya tidak turun. Artinya 300 dibagi 1,3. Karena 1.000 tambah 300. Nah untuk itu lah kami tetap berkomitmen mencapai 23% di tahun 2025, tetapi tentu saja porsi energi baru terbarukan secara absolut jumlah megawatt terpaksa kami tambah. Karena, pembangkit yang berbasis pada *fossil fuel* sudah *kebanjur* ditandatangani dari tahun 2015 sampai 2017. Untuk itu, lanjut.

Kalau kita melihat juga bahwa, untuk pengembangan pembangkit EBT 2021 sampai 2030, kita sudah me-*release* RUPTL tahun 2021-2030, di mana RUPTL ini paling hijau diantara dalam sejarah Indonesia, yaitu 51,6%-nya berbasis pada energi baru terbarukan, atau dengan absolut yaitu sekitar 20,9 gigawatt. Lanjut.

Dalam proses ini kami mengakui bahwa kondisi *oversupply* terjadi di Pulau Jawa. Kalau kita melihat di sini bahwa, riset margin-nya sangat tinggi

sekali di tahun 2021 bahkan 61%, di tahun 2025 50%, dan itu berlanjut sampai 2030, yaitu sekitar 40%. Lanjut.

Hak yang sama juga terjadi pada sistem Sumatera. Ini mohon izin Pak Ketua, ini kita simulasikan sedikit Bapak. Saat ini beban puncak di Pulau Sumatera adalah yaitu 6 gigawatt, pertumbuhan yaitu 5% per tahun, lebih tinggi dari pada Jawa, sehingga di tahun 2025 tadinya 6 gigawatt akan naik menjadi 7,5 gigawatt Pak, Bapak, gitu beban puncaknya Pak.

Daya mampu pasok adalah 7,53 watt, tetapi sampai tahun 2025 sudah *kebanjur* di RUPTL, muncul tambahan pasokan daya yaitu 5 gigawatt dari tahun ini sampai tahun 2025. Artinya, 7,5 gigawatt pasokan yang sudah ada ditambah 5 gigawatt menjadi 12,5 gigawatt, tetapi beban puncaknya hanya 7,5 gigawatt Bapak. Artinya **disemacinya** bahkan lebih tinggi daripada yang diperkirakan, yaitu 50% di tahun 2025, hitung-hitungannya yang termutakhir, bisa naik menjadi 65%. Artinya juga *take or pay* kami juga dalam kondisi yang sangat krisis, di mana kontrak-kontrak dengan pembangkit-pembangkit ITP itu adalah kontrak dengan ada term-nya *take or pay*.

Untuk PLTU berbasis pada batubara.

**KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-P.NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Pak Dirut, mumpung masih di sini.

Kalau sudah ada prediksi kita akan, ya katakanlah akhirnya jadi *oversupply* lagi, toh ini kan ITP. Bisakah kita *take or pay*-nya menyesuaikan agar tidak sampai situ? Bisa *nggak* kita menyasati di situ? Kan *take or pay* kan tidak 100% kan? Ada yang 85%, ada yang 70. Coba katakanlah kita **pack**, kalau gitu *take or pay* 50%, misalnya. Bisa *nggak*? Mungkin *nggak* itu?

**DIREKTUR UTAMA PT. PLN PERSERO (DARMAWAN PRASODJO):**

Siap Bapak.

Kami izin melaporkan Pak, bahwa *take or pay* ini ada beberapa aspek Bapak. Aspek pertama adalah waktu, kapan mulainya Pak, yang itu dinamakan dengan *commissioning date*. Jadi tanggal berapa pembangkit ini masuk ke dalam sistem PLN, maka apabila kami memakai pembangkit itu, kami membayar namanya komponen A atau *take or pay*, Pak. Kami tidak memakai, kami membayar juga. Nah jumlahnya berapa? 1 gigawatt-nya adalah 3,5 triliun Pak. Jadi kami pakai, kami bayar, kami tidak pakai, kami bayar Pak. Jadi term yang pertama adalah *comisioning* Pak.

Nah tanggal Bapak, yang kedua itu adalah namanya tingkat utilisasi Pak, *capacity* faktor. Itu sekitar PPA kita rata-rata antara 80% sampai 85% Bapak, itu. Nah untuk itu, ini adalah kontrak PPA yang berskala internasional. Kalau pembangkitnya dari Jepang, biasanya ada **JEBIK**, yaitu Kementerian Keuangannya dari Jepang, kemudian kalau Cina biasanya ada China

*Development* Bank dan lain-lain, dan itu juga bagian dari pemerintah Cina. Dan kami sudah me-*review* kontrak, bahwa di situ tidak ada klausul *force major*. Jadi dengan adanya Covid, kemudian *demand*-nya turun, itu ternyata tidak masuk ke dalamnya, kemudian juga pengalaman, kami pengalaman dua kali renegotiasi secara legal di arbitrase internasional, yaitu Karaha Bodas dengan Phyton, pada waktu itu dipimpin langsung oleh Presiden Soeharto dengan 8 menterinya, dua-duanya berakhir dengan *press and burn* Bapak. Di mana, PLN malah kalah sekitar 350 juta US dolar atau sekitar Rp5 triliun.

Nah untuk itu yang sudah kami lakukan saat ini adalah, kami tidak meng-*call force major*, tetapi kami meng-*call* namanya *hardship*, di mana pada saat PPA itu ditandatangani, asumsinya dianggap benar, maka kontrak tersebut sebenarnya *fair*. Tetapi begitu asumsinya tidak terpenuhi, maka kontrak yang tadinya *fair* bergeser menjadi tidak *fair*, resiko dan beban semuanya ada di PLN, sedangkan resiko dari sudut pandang ITP atau perusahaan listrik swastanya sama sekali tidak tersentuh.

Nah untuk itu dengan *hardship* ini, kami berusaha menggeser Bapak. Ada dua aspek, pembangkitnya kami mundurkan, maupun kontraknya tadi yang 80% kami turunkan Pak. Itu dua-duanya kami usahakan dari upaya kami, yaitu target 60 triliun, kami sekarang sudah merealisasikan 32 triliun, Bapak. Jadi betul, Pak. Tetapi juga, kapasitas yang bisa kami negosiasikan terbatas, karena ini bukan *legal battle* Bapak, tetapi ini lebih ke rembukan, sampai seberapa mana dan mereka buka-bukaan juga. Begitu kami melewati titik itu, ternyata mereka juga mengalami kebangkrutan, Bapak. Jadi ini titik temunya saat ini 32 triliun dari 60 triliun target kami, dan renegotiasi sedang *on going*.

Demikian Pak. Mohon izin lanjut, Bapak.

Nah untuk itu Pak, di Sumatera, jadi sampai tahun 2025 ada penambahan 5 gigawatt, sedangkan kebutuhan kami sebenarnya kalau mau ideal hanya 2 gigawatt Bapak. Sehingga *take or pay* ini *oversupply* di Sumatra juga semakin memburuk. Mundur satu halaman lagi.

Di sini kami perkenalkan bahwa di sebelah kiri kami ada Direktur Regional untuk Sumatera-Kalimantan Pak Adi Lumakso, dan di sebelah kami disini ada Direktur Regional untuk Jawa-Madura-Bali, Pak Haryanto. Nah untuk Jawa-Madura-Bali Bapak, ini contoh, pertumbuhan *demand* kami selama setahun sebelum adanya Covid adalah 1 gigawatt per tahun Pak. 1.000 megawatt, ini itu Pak Haryanto di-*confirm* 1 mega Pak. Dengan adanya covid, maka pertumbuhan turun menjadi hanya 800 megawatt. Coba kita hitung, selama 12 bulan ini akan ada masuk:

1. Jawa IV 2 gigawatt ITP
2. Cirebon Expansion 1 gigawatt ITP
3. PLTU Batang 2 gigawatt ITP 5 gigawatt, kemudian ada tambahan lagi adalah,
4. PLTGU di Tambak Lorok, Semarang, miliknya Indonesia Power.

Jadi selama 2 bulan ini akan ada penambahan 5,8 gigawatt, sedangkan penambahan *demand* hanya 800 megawatt. Sehingga dalam hal ini, ada

kelebihan pasokan 5 gigawatt hanya dalam 12 bulan. Sehingga dalam proses itu laporan keuangan kami tahun ini, yang tadinya positif tentu saja langsung menjadi negatif karena kami harus membayar *take or pay*. Berapa *take or pay* yang harus kami bayar? 1 gigawatt-nya adalah sekitar 3 sampai 3,5 triliun. Ini bergantung, kalau PLTGU 1 giga-nya sekitar 2,2 triliun, pembangkit dari Jepang sekitar 3,5 triliun, tetapi operasionalnya sangat murah kok Bapak, karena perawatannya hampir tidak ada. PLTU dari China investasinya murah Pak, hanya 3,2 triliun tapi perawatannya lebih mahal karena sering rusak. Jadi sebenarnya hampir sama saja Pak, tapi kelihatannya nanti perawatan lebih sering, sehingga rata-ratanya sekitar 3,3 sampai 3,5 triliun. *Monggo* dikalikan 5 gigawatt dikalikan 3,5 triliun Bapak. Jadi sekitar 18 triliun, itu hanya di Jawa-Madura-Bali.

Nah untuk di Sumatera, masuknya pembangkit-pembangkit tersebut di akhir 2023 sampai 2024, tetapi saat ini juga sudah ada kelebihan sekitar 1 gigawatt. Jadi ini, kemudian di Kalimantan juga mengalami hal yang sama untuk di interkoneksi, Kalimantan interkoneksi, juga terjadi juga di Sulawesi bagian Selatan gitu Pak. Untuk itu di Sulawesi adalah Direktur Regional Sulawesi-Maluku-Papua-Nusa Tenggara adalah Pak Adi Priyanto. Silakan Pak Adi di sana. Itu juga mengalami kondisi yang hampir mirip. Lanjut, lanjut.

Nah untuk itu, dalam RUPTL, kalau kita lihat ini sebagai contoh kesulitan yang kami hadapi adalah, bahwa di RUPTL itu kalau kita lihat kuota untuk pembangkit listrik tenaga air di Sumatera, di tahun 2025 adalah 90 megawatt. Kuota di tahun 2028 adalah 160 megawatt, kuota di tahun 2030 ada 400 megawatt. Dan kalau kita melihat, ini contoh ini di Pak Adi Lumakso, Direktur Regional untuk Sumatera-Kalimantan, sudah tercatat DPT untuk PLTA.

Di Sumatera sendiri itu ada sekitar 76 lokasi dengan jumlah kapasitas potensi yang ingin segera masuk ke dalam sistem PLN adalah 5,4 gigawatt, gitu Pak Ketua, mohon izin Pak. Nah tentu saja dengan potensi yang sangat besar seperti ini, tetapi dalam RUPTL yang tercantum hanya 90 megawatt di tahun 2025, tentu saja itu adalah kapasitas yang kita lelang di tahun ini, tentu saja terjadi antrian yang cukup panjang, dan tentu saja akan ada segera tuduhan bahwa PLN seakan-akan mempersulit penandatanganan dari *power purchase agreement*, sedangkan sebenarnya kami bukan memperlambat atau mempersulit, tetapi kami memang punya masalah menyeimbangkan antara pasokan dengan *demand*, di mana di RUPTL kami dengan masuknya pembangkit ini pun sebenarnya sudah overdosis begitu Pak, Bapak Pimpinan dan para Anggota Komisi VII.

Nah untuk itulah, kami memang saat ini mempunyai tantangan yang luar biasa, itu adalah bagaimana agar keseimbangan pasokan dengan *demand* ini terus terjaga, karena kita berbicara mengenai *financial sustainability* dari *survival* dari PLN secara finansial. Lanjut.

Ini juga kuota kapasitas PLTA dengan potensi DPT yang ada. Kami juga melihat suatu disparitas yang luar biasa antara, selamat datang Pak Wakil Ketua. Kami juga melihat bahwa disparitas antara DPT untuk PLTA dan

penambahan *demand*, dan juga yang tercatat di RUPTL terjadi disparitas yang luar biasa.

Di sini, kami didampingi oleh Direktur Mega Project dan Energi Baru Terbarukan, Pak Wiluyo di sebelah kanan kami. Beliau yang sebenarnya melelang energi baru terbarukan, dan saat ini kami sudah memerintahkan bahwa proses bisnis dalam penandatanganan PPA dan lelangnya kita rombak, dari yang tadinya kompleks, berbelit, menjadi lebih mudah, lebih ringkas, tetapi tetap ada permasalahan secara fundamental, bagaimana kami menyeimbangkan antara pasokan dengan *demand*.

Tentu saja akan sangat mudah sekali apabila ada aturan bahwa PLN harus membeli penambahan EBT berapapun jumlahnya untuk menambah misalnya kapasitas pembangkit dari EBT. Tentu saja kalau aturan itu di-*taken*, itu otomatis kami secara *legal* harus mengakomodir penambahan pasokan berapapun, tetapi di lain sisi tentu saja aturan seperti itu akan membuat beban keuangan PLN yang sudah sangat berat. TOP-nya sudah sangat tinggi, menjadi lebih berat lagi, dan juga ada kemungkinan juga *financial sustainability* dari PLN akan terkompromikan. Lanjut, ini lanjut saja.

Ini juga sebaran kuota kapasitas PLT Bio Energi. Ini juga kami petakan satu-persatu, lanjut saja.

Nah untuk selanjutnya adalah, kami memaparkan proses kerja sama pembangkit listrik energi baru terbarukan sebagai tindak lanjut RUPTL 2021 sampai 2030. PLN telah melaksanakan kerjasama pengembangan pembangkit EBT. Ini baik skema *independent power producer* maupun *engineering procurement contract* dari PLN. Dan untuk itu kami didampingi oleh Direktur Mega Project dengan EBT, Pak Wiluyo inilah yang melakukan pelelangan di dalam direktoratnya beliau.

Ini pertama, kami sudah melakukan penandatanganan PPA, pembangkit EBT tahun 2021 sebanyak 9 PPA, dengan total kapasitas 30,7 megawatt. Ini ada PLTM Sukarame Lampung 7 megawatt dan lain-lain. Pada Tahun 2022 juga dilaksanakan penandatanganan PPA. Diantaranya ada, PLTS Bali Barat 25 megawatt, PLTS Bali Timur, Kukusan dan lain-lain, kemudian termasuk beberapa pengadaan proyek IPB yang dilaksanakan di tahun 2022, di antaranya program dieselisasi yang saat ini sedang *on going*.

Untuk pengembangan lapangan panas bumi telah dilaksanakan *head of agreement* dengan PT Geo Dipa Energi untuk PLTP Dieng Banary 10 megawatt juga pembangkit listrik tenaga panas bumi Candradimuka 40 megawatt di Jawa Tengah. Kami juga melaksanakan kerjasama dengan *lender* dan EPC kontraktor untuk pembangunan pembangkit PLN diantaranya PLTA Peusangan, Asahan, Jatigede dan lain-lain. Kami juga melakukan kerjasama implementasi program *co-firing* biomassa PLTU. Ini adalah menjadi salah satu program strategis PLN dalam peningkatan bauran EBT. Untuk itu, kami telah menginisiasi kerja sama pendampingan guna membangun industri biomassa. Ini salah satunya adalah kita sudah tanda tangan *head of agreement*,

penyediaan biomassa antara PLN dengan Perhutani dan PTPN 3. Ini pada 16 Juli 2021.

Kemudian juga kita sudah melakukan perjanjian kerja sama dengan Perhutani untuk lokasi PLTU Rembang dan PLTU Pelabuhan Ratu. Kami juga melakukan MoU penyediaan biomassa sekam padi antara PLN dengan Sang Hyang Seri, kemudian juga pendampingan pengembangan BPJP plan di TPSA Bagendung Cilegon, ini bekerja sama dengan Pemkot Cilegon. Ini juga untuk lokasi lainnya kami bekerjasama dengan pemda dan Ditjen Cipta Karya dari PUPR. Untuk pembangkit EBT, pada tahun 2021 sudah beroperasi komersial sebesar 623 megawatt, geotermal 155 kemudian bionya ada 16,4 megawatt, dan *hydro*-nya 450,9 megawatt. Lanjut.

Untuk pengembangan EBT di tahun 2022, target adalah 228 megawatt, realisasi sampai Februari, akhir Februari sudah 22,11 megawatt. Kami melakukan *monitoring* secara ketat, mingguan. Yang penting lagi adalah, kami mengidentifikasi apapun sumbatan itu, kalau ada sumbatan segera kita urai, kita selesaikan, dan PMO nya ada di tempatnya Pak Wiluyo, di sebelah kanan saya.

Kemudian selanjutnya adalah dampak Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2021 tentang PLTS Atap. Ini nanti saya minta Pak Hariyanto ini yang memaparkan, Direktur Jawa-Madura-Bali. Dengan adanya PLTS Atap ini adalah suatu keniscayaan. PLN siap mendukung transisi energi, dan salah satunya adalah PLTS Atap. Nah, dalam proses ini muncul Permen 26 Tahun 2021, di mana ada perubahan, tadinya *export* dari listrik dari PLTS ke PLN apabila ada *surplus*, itu adalah 0,65 dikalikan harga jual listrik. Jadi 0,65 dikalikan 1.469. Tetapi ada perubahan dari Permen ini, di mana *export* listrik yang tadinya 0,65 diubah menjadi 100%.

Apa artinya? Adalah tadinya *export* listrik atap ke PLN 6,5 sen naik menjadi sekitar 10 sen rupiah. Tentu saja ini perbedaan konsep, di mana tadinya untuk konsumsi sendiri, disini menjadi menjelma, menjadi *micro independent power producer*. Dan dalam hal ini biayanya berapa bagi PLN 10 sen. Nah, jumlah yang ditargetkan di tahun 2024 adalah 3,6 gigawatt, di mana 3,6 gigawatt ini di luar dari keseimbangan dari pasokan dengan *demand* yang sudah ada di RUPTL, di mana di RUPTL sudah ada pengembangan PLTS sebesar 4,7 gigawatt. Jadi ini di luar dari keseimbangannya dari RUPTL.

Nah dari hitung-hitungan yang dilakukan oleh Kementerian ESDM dengan badan kebijakan fiskal, maka ditengarai kebijakan ini akan meningkatkan beban, yaitu pertama adalah *integration cost*, dan kedua adalah bagaimana pembangkit PLN yang sudah mengalami *oversupply*, maka akan semakin nganggur. *Return on asset* kami saat ini hanya 0,4%, dan nanti kedepannya dengan adanya penambahan kapasitas di tengah *oversupply* tentu saja akan semakin menurun. Dan untuk itu, pemasangan PLTS Atap ini sebagian besar adalah di Jawa-Madura-Bali, di mana di situ adalah 73% dari seluruh *demand* PLN ada di Jawa-Madura-Bali.

Untuk itu, *monggo* Pak Haryanto, pendek, di jelaskan kondisi dari dampak terhadap PLTS Atap ini pak. *Monggo* pak, Pak Haryanto, waktu dan tempat saya persilakan.

### **PT PLN PERSERO (HARYANTO):**

Terima kasih Pak Dirut.

Yang kami hormati Bapak Pimpinan Komisi VII beserta Anggota,

Izin menambahkan yang diusulkan oleh Pak Dirut. Kami laporkan bahwa, secara finansial Pak itu tadi sudah menyampaikan bahwa, dampak dari implementasi Permen 026/2021 ini sudah beberapa kali dibahas Pak bersama BKF kementerian terkait. Dan hitung-hitungannya adalah kira-kira ada beban tambahan 14,2 triliun per tahun di tahun 2025 nanti. Di mana dari angka 14,2 triliun ini 25% akan menjadi beban pemerintah dan 75% menjadi beban PLN. Namun demikian bahwa beban ini belum diakomodir oleh *revenue* model yang ada, sehingga memang implementasi *rooftop* ini harus dibarengi dengan perubahan *revenue* model, yaitu perubahan daripada Permen yang sudah ada selama ini.

Kemudian kami laporkan juga bahwa, Permen 026 ini belum banyak mengatur aspek teknis. Karena kita tahu dengan rasio 1 dibanding 1 bahkan dengan target yang luar biasa, di mana pada tahun 2022 ini ditargetkan ada tambahan PLTS Rooftop 450 megawatt, kemudian tahun 2023 900 megawatt, kemudian tahun 2024 1.800 megawatt, dan tahun 2025 3.600 megawatt, maka akan ada dampak secara teknis di jaringan kami. Di antaranya adalah, ini akan mengganggu pelanggan-pelanggan *existing*, ketegangannya akan naik-turun, kemudian juga susut PLN akan naik, kemudian ada faktor-faktor teknis harmonisa dan sebagainya, dan proteksi-proteksi harus diatur kembali, yang ini memang belum diatur secara detail di dalam Permen ini.

Kami sudah bertemu dengan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan beserta staf sudah mengadakan FGD, dan kami masih terus membahas apa-apa yang harus diatur dalam aspek teknis ini di dalam implementasi daripada PLTS Rooftop ini. Karena ini nanti apabila di sudah massif, maka arusnya akan berbalik, bukan dari atas ke bawah, dari transmisi ke distribusi, tapi bisa balik dari distribusi ke transmisi. Jadi dari bawah ke atas. Nah ini, tentu saja harus kami siapkan dengan baik.

Oleh sebab itu, kami kalau di dalam Permen ini mengatur bahwa daya yang boleh dipasang *rooftop* itu adalah setinggi-tingginya atau maksimum sama dengan daya tersambung, kami juga sedang membahas agar ini tidak diberlakukan, karena ini akan terjadi yang disampaikan oleh Pak Dirut tadi adalah mikro *great*, mikro ITP. Artinya, bahwa pelanggan akan mengeksor listriknya ke PLN, sementara kami laporan Bapak, bahwa pada saat beban rendah hari Sabtu dan Minggu, beban sangat rendah, PLN terpaksa mematikan PLTU-PLTU atau pembangkit yang murah, tapi pada saat yang sama kami harus membeli listrik dari PLTS *rooftop* ini atau mikro ITP ini dengan harga yang mahal. Nah ini tentu saja adalah satu ironi bahwa kami harus mematikan

pembangkit sendiri yang murah, tetapi dilain pihak kami harus membeli listrik yang mahal. Oleh sebab itu kami mohon izin juga, tentang pembatasan daya ini juga diberlakukan.

Kemudian, kami laporkan juga bahwa, di dalam Permen ini juga mensyaratkan PLN harus menginvestasikan Skada dan sebagainya, investasi-investasi baru, dan ini bentuknya penugasan yang tentu saja PLN harus menyisihkan anggarannya untuk investasi. Dan ini akan mengurangi investasi untuk penyambungan pelanggan baru.

Nah demikianlah Pak, kira-kira aspek teknis dan sedikit **komersial** Pak Dirut.

Terima kasih Pak.

#### **DIREKTUR UTAMA PT. PLN PERSERO (DARMAWAN PRASODJO):**

Mohon izin ini. Terima kasih Pak Haryanto.

Bahwa ini sebagai contoh, saya daya terpasang di rumah saya adalah 32.000 watt, tetapi ternyata yang dipakai hanya sekitar 5000 watt, sehingga ada kelebihan 27.000 watt yang tidak pernah terpakai. Nah untuk itu, saya dengan aturan tersebut boleh memasang sampai 32.000 watt, sedangkan memakainya 5.000 watt. Maka, ada potensi, ada *export* sebesar 27.000 watt dimana ada pergeseran. Tadinya memasang PLTS Atap dengan aturan lama itu ...*(suara tidak jelas)*... hanya sekitar 11%, maka dengan aturan baru ini ...*(suara tidak jelas)*... menjadi sekitar 18% dengan keuntungan *windfall* profit yang sangat tinggi, tetapi di saat bersamaan ada beban yang luar biasa yaitu sekitar 14 triliun tambahan bagi PLN yang tentu saja ini juga menjadi *di-pass through* juga ke Kementerian Keuangan.

Dan untuk itu kami mohon izin mendukung PLTS Atap ini. Tetapi karena ini penugasan, tentu saja perlu ada alokasi anggaran yang jelas dari Kementerian Keuangan, walaupun ini mengingat bahwa di tahun 2023 nanti defisit dari APBN akan kembali menjadi 3%, sehingga juga ruang di APBN juga akan cukup agak sempit di sana. Dan ini, 14 triliun itu adalah per tahun, dan ini komitmen selama 20 tahun mendatang, sehingga ini adalah komitmen dari APBN dan PLN sebesar 280 triliun selama 20 tahun mendatang.

#### **F-P.NASDEM (RICO SIA):**

Izin Pimpinan, izin Pimpinan.

Pak Dirut izin, saya dengan Rico.

Paparan sedikit tadi dari Bapak, Pak Haryanto, saya kok lagi mikir ini lama-lama dengan adanya PLTS dan lain sebagainya, bisa-bisa PLN bangkrut, ada *oversupply*. Saya kasih contoh 1. Sedikit saja, maafin nih. Saya kemarin mau bikin PLTS. Contoh misalnya saya mau bikin dengan 30.000 terkait dengan yang tadi, apakah sesuai dengan yang terpasang atau boleh lebih.

Nah, seandainya kalau saya pasang PLTS 30.000, sementara yang dipakai cuma 10.000, saya ekspor ke PLN 30.000, tapi yang saya pakai cuma hanya 10.000 misalnya. Itu bagaimana cara perhitungannya? Apa PLN nanti *nggak* tambah bangkrut Pak? Dengan tadi hitungan 6 sen, 10 sen tadi? Akhirnya saya sendiri, saya sendiri pelaku nih Pak. Akhirnya saya membatalkan itu Pak. Mau bikin itu pun akhirnya saya batalin, karena lama-lama saya berpikir, kok saya bangkrutin PLN ini ya.

Terima kasih Pimpinan.

**KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-P.NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Silakan Pak Dirut.

**DIREKTUR UTAMA PT PLN PERSERO (DARMAWAN PRASODJO):**

Mohon izin, memang dengan aturan Permen yang lama ekspornya hanya 0,65 Pak, 0,5, jadi sekitar 6,5 sen Bapak, dan itu setara dengan pembelian listrik kami dari ITP, Pak. Jadi kami menggunakan itu. Memang juga kami harus mengakui, kami mendukung Pak. Ini keniscayaan tidak bisa dibendung, dengan aturan yang lama memang *pay back*-nya itu sekitar 8 sampai 9 sampai 10 tahun Pak, tapi dengan atur, dan di mana konsepnya adalah untuk konsumsi sendiri Pak. Karena apa? Karena mengekspor ke PLN itu kami beli seperti ITP, Pak. Nah dengan konsep yang baru mengekspor ke PLN, itu keuntungannya besar sekali di atas harga biaya pokok produksi dari pemasangan PLTS Atap itu Pak.

Nah untuk itulah, kami harus mengakui, terjadi pergeseran secara fundamental filosofis, yang tadinya ini dipakai untuk sendiri, sekarang dijadikan seperti mikro ITP, Pak. Ini contoh. Kami memang mendapat tekanan, misalnya ada suatu perusahaan, kami sebut aja Mitsubishi Pak, karena ini tertutup. Jadi bahwa memang, kalau Bapak baca bahwa PLN tidak mendukung PLTS Atap dan lain-lain, begitu Pak. Nah, Mitsubishi terpasang 11,5 megawatt ya Pak Haryanto? Ini karena ini Pak Haryanto yang ngurus di bawah Direktur Regional, kemudian ingin memasang 11,5 megawatt Pak, dengan catatan ekspornya nanti seberapa?

Nah, pemakaian yang terendah pada hari yang mereka tidak beroperasi hanya sekitar 1,5 megawatt, Pak. Jadi kalau dipasang 11,5 ada potensi ekspor 10 megawatt dengan harga 10 sen. Nah, apabila pada saat *pick*-nya mereka, itu kami sudah mengidentifikasi secara historis 4,5 megawatt. Nah tentu saja kami berkomunikasi ke pemerintah, apakah Permen Rooftop ini adalah untuk konsumsi sendiri atau mikro ITP? Jawabannya adalah untuk konsumsi sendiri, karena pemerintah mengakui bahwa PLN saat ini sedang mengalami *oversupply*.

Nah, dalam Permen *Rooftop* itu ada pasal yaitu boleh memasang sampai ke daya pasang yang terpasang dari PLN. Artinya mereka boleh memasang sampai 11,5. Di sinilah terjadi *deadlock*, Bapak. Kami akhirnya

meminta ya mohon dipasang saja sesuai dengan konsumsi yang dipakai oleh mereka, yaitu sekitar 1,5 agar tidak terjadi ekspor. Mereka juga meminta tetap 11,5 karena Permennya juga membolehkan itu.

Dan dalam proses itu kami PLN dalam wacana publiknya memang seakan-akan menjadi, ini penjahatnya di situ Pak, bahwa kami ingin, tidak ingin mendukung PLTS Atap, tetapi kami juga di sini ingin terbuka, kami mengapresiasi bawah ini rapat tertutup, kami mengakui kami mengalami *oversupply* dengan jumlah yang triliunan, dan untuk itu saya sendiri, latar belakang saya adalah energi baru terbarukan, pada saat kuliah itu saya termasuk yang sedikit anti *coal*, saat ini saya sebagai Presiden Direktur, Direktur Utama perusahaan yang mngoperasikan *coal*/yang terbesar, salah satu terbesar di dunia, dan tugas saya sebagai Direktur Utama adalah menjaga *financial sustainability* dari PLN apa. Nah untuk itu, ini juga terjadi suatu polemik, berapa megawatt yang boleh dipasang.

Nah tentu saja aspirasi kami adalah, apabila *export* listrik dari PLTS Atap dikembalikan seperti semula 0,65 di Permen yang lama, tentu saja polemik ini segera berhenti, yaitu PLTS Atap bukan dalam kerangka perubahan filosofis menjadi *micro* ITP, di saat ini kami mengalami kesulitan, tetapi ini adalah dalam rangka konsumsi sendiri. Tentu saja ini perubahannya akan besar. Nah, begitu *rate of return* 18% tentu saja ini adalah investasi yang sangat menguntungkan. Karena dari sudut pandang perbankan *rate of return* 11% itu sudah *bankable* Bapak, Pak Ketua mohon izin, Pak. Kalau 18% nanti ada perusahaan yang datang ke perusahaan-perusahaan yang punya atap besar, daya yang mau terpasang, mereka yang memasang, mereka yang membiayai, pelanggannya yang pasang dengan PLN nanti tahu beres, Pak. Dengan *rate of return* 18% margin yang besar itu bisa dibagi dengan baik Pak.

Nah untuk itu, memang ini menjadi salah satu tantangan secara finansial bagi PLN dan juga bagi APBN. Karena 14 triliun dikalikan 20 tahun ada 280 triliun menjadi tambahan beban APBN dan PLN secara bersama.

**F-P.NASDEM (RICO SIA):**

Baik, terima kasih Pak Dirut PLN.

Itu tadi yang mau saya sampaikan adalah bentuk, kok saya merasa kasihan sama PLN ya? Karena saya coba membuat tadi, jangan sampai saya punya kebutuhan pakai cuma 2.500 watt, tapi saya pasang 30.000 terus saya kirim ke sana yang sisanya. Jadinya bisa-bisa ngutang ya PLN sama saya kalau hitung-hitungan mau pasang gede gitu. Apalagi dengan adanya *oversupply* tadi.

Terima kasih atas penjelasannya Pak Dirut.

**KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-P.NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Lanjut Pak.

**WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI (BAMBANG HARYADI, S.E./F-P.GERINDRA):**

Mungkin Permennya ini nggak koordinasi juga ya sama PLN ya kemarin? Pada saat penyusunan Permen ada koordinasi *nggak* Pak Dirut?

**DIREKTUR UTAMA PT PLN PERSERO (DARMAWAN PRASODJO):**

Mohon izin Bapak, bahwa Permen ini adalah kebijakan pemerintah Pak, sehingga kami sendiri di sini memang harus menjalankan sesuai dengan kebijakan pemerintah.

**WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI (BAMBANG HARYADI, S.E./F-P.GERINDRA):**

Pak Dirut dilanjut, entar kita dalamin. Soalnya tadinya itu Permen tuh tujuannya adalah konsumsi sesuai kebutuhan pelanggan. Misalnya saya di rumah saya butuh 20.000 watt misalnya kan, kWh ya kan. Jadi saya bikin PLTS di atap rumah saya *nggak* boleh lebih dari itu, gitu loh. Tapi kita baru tahu kalau Permennya sudah menjadi semacam pembangkit tersendiri itu. Ntar kita ini, telusuri.

Silakan.

**DIREKTUR UTAMA PT PLN PERSERO (DARMAWAN PRASODJO):**

Mohon izin Pak Ketua, kami boleh izin merespon.

Nah, begitu aturan yang lama itu berlaku 0,65 Bapak, saya sendiri misalnya saya terpasang 32.000 memakainya nya 5.000 Pak. Itu dengan Permen yang lama saya berusaha agar memasang PLTS hanya dikonsumsi sendiri Pak, karena bisa menggantikan listrik PLN dengan harga 1.469 Pak. Jadi bagi saya *the best commercial solution* bagi saya, kalau menggunakan Permen yang lama adalah sesuai dengan konsumsi saya, Pak. Kalau di atas dari konsumsi saya, maka saya dirugikan sendiri Bapak. Karena apa? Karena ekspornya hanya 0,65, tetapi begitu diubah menjadi 0,65 menjadi 1, maka akan lebih menguntungkan bagi saya apabila memasang berlebih di atas dari konsumsi kami, Pak. Sehingga memang di sini dari 0,65 menjadi 1, itulah perubahan secara filosofis bahwa PLTS Atap yang tadinya untuk konsumsi sendiri, maka sekarang menjadi *micro* ITP.

Demikian Bapak.

Itu sebenarnya 0,65 menjadi 1. Jadi kalau di masa lalu saya masih pasang 5.000 Pak. Karena apa? Saya menggantikan listrik PLN yaitu 1.460, anggap 1.500 dan itulah batasnya. Setelah itu dihitung hanya 0,65 tidak menguntungkan, Pak. Sehingga kalau misalnya ini memang untuk konsumsi

sendiri tolak ukurnya adalah ekspornya berapa Pak? Kalau ekspornya 1, ya itu bukan lagi untuk konsumsi sendiri tetapi memang berorientasi pada ekspor.

Demikian Bapak.

Nah, untuk itu kami melanjutkan. Ini dengan harga batubara, kami mengakui bahwa pertama kami mohon maaf di awal tahun terjadi krisis batubara dengan kenaikan harga mencapai 150 sampai 160 dolar per ton. Kemudian kami mengucapkan terima kasih, karena dengan adanya ketegasan dari pemerintah, baik itu menghentikan ekspor batubara, kemudian juga memperbaiki, memperkuat, memperkokoh, Kepmen yang sebelumnya, saat ini sudah berjalan dengan lebih baik lagi.

Pertama adalah *domestic market obligation*, yang tadinya di-*inforce* tahunan saat ini di-*inforce* bulanan. Kemudian juga *inforcement* ini adalah apabila terjadi kegagalan *loading* di titik *loading port* pada hari H, maka saat itu juga sistem digital *monitoring*-nya PLN sudah tersambung dengan sistem digital monitoring dari Dirjen Minerba dan langsung diambil langkah-langkah untuk penghentian operasi dari penambang di titik tersebut. Sehingga dalam hal ini, kami mengakui bahwa harga batubara meningkat sampai 336 dolar per ton, tetapi saat ini juga pasokan ke PLN masih berjalan dengan lancar, dengan catatan kami menekankan bahwa *inforcement* dari kebijakan pemerintah itu sudah dilakukan secara digital dan dilakukan *day to day*. Sehingga apabila terjadi kegagalan *loading* langsung terjadi penghentian ekspor.

Nah, untuk itu kami juga mungkin ingin sedikit mengulas, seperti apa harga batubara begitu Pak, izin Pak Ketua. Bahwa harga batubara ini bergantung pada interaksi *balance* antara pasokan dengan *demand* itu. Nah, untuk di Indonesia sendiri, ada penambahan sekitar 12 gigawatt pembangkit listrik berbasis pada batubara yang akan masuk antara tahun ini sampai tahun 2026 dan itu menjadi bagian dari 35 gigawatt. Artinya apa? 1 giga itu kebutuhannya 6 juta ton, kalau ada 12 giga ya kalikan saja, sekitar 12 tambah kalikan 6.

Kemudian di Cina di tahun 2020 ada penambahan pembangkit berbasis batubara. Selama setahun 2020 saja 35 gigawatt. Artinya 35 gigawatt dikalikan 6 juta sekitar 200 juta ton. Walaupun terjadi transisi energi, perubahan iklim terjadi di dunia, ternyata China berencana membangun 200 gigawatt PLTU antara 2021 sampai 2025, dan mungkin ada perubahan ini kami mendengar, mungkin dipotong 50%. Jadi nanti akan ada penambahan 100 gigawatt lagi Pak Ketua, mohon izin Pak. 100 juta kalikan 6 juta per ton, eh per giga, jadi 600 juta. Jadi kami melihat bahwa di tengah transisi energi yang sedang *on going* saat ini, ternyata *balance* antara pasokan dengan *demand*, ternyata *demand* semakin meningkat sampai tahun 2030, sehingga kami melihat bahwa disparitas harga ini masih akan terus berlanjut sampai beberapa tahun mendatang.

Nah untuk itu, kami harus mengakui, saat ini masih terjadi disparitas yang luar biasa, dan dari disparitas ini muncul namanya moral *hazard*. Dan untuk itu kami mengapresiasi langkah-langkah yang sudah diambil oleh Komisi

VII yang pada waktu itu ada panja yang dipimpin oleh Pak Sugeng dengan Pak Maman, itu mengusulkan agar disparitas harga ini bisa diselesaikan dengan baik, yaitu dengan pembentukan suatu lembaga, di mana PLN tetap membayar 70 dolar tetapi kontraknya seakan-akan sudah menggunakan *market price*, di mana selisihnya akan ditanggung sama rata, sama rata oleh seluruh penambang yang melakukan ekspor. Dan pada saat itu hitung-hitungan kami adalah, apabila terjadi penambahan *windfall profit* karena kenaikan harga batubara, maka pungutan yang diambil adalah seperempat dari total *windfall profit* tersebut, dan itu sudah kami konfirmasi ke BPKP.

Nah, untuk itu dengan adanya usulan dari Komisi VII tersebut, kami melihat bahwa di jangka pendek ini *inforcement* yang dilakukan kolaborasi antara PLN dengan Dirjen Minerba berjalan dengan baik. Harapan kami di masa menengah dan masa agak panjang, bahwa disparitas harga ini bisa diselesaikan juga dengan mekanisme pungutan, di mana saat ini berkontak dengan PLN, dengan selisih harga sampai 250 dolar per ton, itu satu kapal. Apabila dikirim ke PLN, pengurangan *opportunity for go*-nya sekitar 80 sampai 100 miliar. Kalau dikirim ke luar negeri menggunakan harga ekspor tambahan 100 miliar.

Nah untuk itu moral *hazard* ini masih ada, tetapi saat ini jangka pendek dilakukan dengan *inforcement* yang sangat ketat. Tetapi harapan kami tentu saja di masa menengah dan panjang, ini bisa dilakukan penyelesaian dengan disparitas harga melalui pungutan, sehingga berkontak dengan PLN itu menjadi kontrak yang memang secara komersial juga menjadi lebih *payable*, dan moral *hazard*-nya bisa dieliminasi. Yang bebannya saat ini hanya ditanggung oleh penambang yang berkontak dengan PLN, nanti juga ditanggung secara renteng, secara bersama-sama lebih gotong-royong. Lanjut, lanjut lagi.

Nah, ini adalah harga tren LNG yang juga semakin meningkat. Saat ini harga sudah mendekati di Japan Korea *marker* sekitar 40 sampai 50 dolar per MMBTU. *Alhamdulillahirrabbi lalamin*, karena kontrak gas PLN ini sudah kontrak jangka panjang, dan saat ini kami sebenarnya terekspos dengan kontrak dengan BP Tangguh Pak Ketua, tetapi ada Kepmen yang kemudian mematok kontrak dengan BP Tangguh hanya 5 dolar per MMBTU, Pak. Sehingga, kami tidak terekspos walaupun ada kenaikan harga LNG secara internasional. Nah kontak kami dengan BP Tangguh menggunakan *slup*. Ini Direktur Energi Primer kami di sebelah kanan, Pak Hartanto, *slup*-nya 11,5. 11,25 dikalikan harga ICP Pak. Jadi kalau harga minyak, Indonesian *crude price*-nya naik menjadi 100 dolar, maka harga LNG dari Tangguh naik menjadi 11,25 dolar per MMBTU. Nah, tetapi karena kontrak-kontrak kami sudah jangka panjang, kenaikan dari LNG tidak menjadi eksposur bagi kami.

Kemudian juga ada kenaikan harga Indonesia *crude price*. Asumsi di RKAP kami adalah 63 dolar per barrel, sedangkan saat ini sudah di atas 100 dolar per barrel. Kenaikan 1 dolar per barrel itu menaikkan *cost* kami 400 miliar, sehingga kenaikan dari 63 ke 100 dolar per barrel adalah menaikkan *cost* kami sekitar 17 sampai 19 triliun tambahan, dan ini menjadi salah satu *risk* yang

harus kami kelola dengan kenaikan harga komoditas, yaitu batubara, LNG, maupun BBM.

Kemudian selanjutnya, kami beberapa progres pencapaian rencana kerja prioritas PLN tahun 2022, ini per 20 Maret. Fokus utama PLN tahun 2022 nomor satu adalah melanjutkan efisiensi operasi dan investasi, kemudian kami juga melakukan memperbaiki *revenue* model, meningkatkan *electrifying lifestyle*, dan ini adalah salah satu korelasi dengan kami mengalami kondisi *oversupply*, kemudian kami juga mengembangkan dari ESG dan juga transisi energi, mengembangkan nomor 4 adalah, penting sekali kami saat ini mengembangkan sistem digital dan juga sistem manajemen untuk mengakselerasi transformasi, nomor 5 kami juga berupaya meningkatkan penjualan KWH dan *beyond kilowatt hour*, Ini dalam rangka juga menghadapi kondisi *oversupply*, kemudian kami juga mendapat tugas untuk menata struktur korporasi dan juga *unlocking value portofolio business*.

Dalam hal ini, kami mengakui tantangan kami adalah, *disruption of technology*, juga adanya perubahan iklim, transisi energi, dan juga kami mengalami *oversupply*, sehingga perubahan struktur korporasi ini adalah gunanya agar PLN lebih tangguh dan lebih trengginas untuk mengubah tantangan itu menjadi suatu *opportunity*.

Untuk itu kami mengucapkan terima kasih, demikian kami sampaikan. Memang kami mengakui, terdapat kondisi-kondisi yang menjadi kendala dan tantangan. Kami sudah siapkan strateginya untuk menghadapi *oversupply* ini. Kami sudah melakukan re-negosiasi. Kami berusaha *all out* untuk meningkatkan *demand*. Kami saat ini sedang membangun suatu program untuk pergeseran dari kompor elpiji ke kompor listrik, dimana saat ini 1 kilogram elpiji biayanya adalah sekitar Rp17.000 per kg, itu ekuivalen dengan 7 kWh listrik, sedangkan 7 kWh listrik itu biayanya hanyalah 10.250 jadi sebenarnya lebih murah. Tetapi, kompor induksi listrik kami menjadi kelihatannya tidak bersaing karena 1 kilogram elpiji dijual hanya Rp7.000,- per kilogram, yang sebenarnya harganya adalah 17.000 ada angka subsidi 10.000 kilogram, per kilogram.

Nah untuk itu, kami mengusulkan kepada pemerintah, pada Kementerian ESDM, agar ada percepatan perubahan energi impor, yaitu elpiji, menjadi energi listrik yang produksi domestik, kemudian juga energi yang mahal, elpiji Rp17.000,- per kilogram menjadi energi kompor induksi setara 10.250 kilogram. Kami juga memfasilitasi agar adanya perubahan dari transportasi yang berbasis BBM menjadi transportasi berbasis pada kendaraan listrik. Kemudian ada *electrifying agriculture*, dan *lifestyle*, dan lain-lain. Dan untuk itu kami mohon dukungan, arahan dari Bapak/Ibu Komisi VII DPR RI. Kami juga melakukan akselerasi untuk EBT, dalam hal ini kami memang memfokuskan pada *the* dieselisasi. Di mana saat ini biaya per kWh menggunakan diesel kami, menggunakan BBM sudah mendekati sekitar 33 sen per kWh karena kenaikan harga minyak. Sedangkan di sini Pak Wiluyo di sebelah kanan saya, Direktur EBT saat ini sedang melelang perubahan mesin diesel menjadi energi baru terbarukan dengan dilengkapi dengan *battery energy storage system*. Memang tidak murah, masih sekitar 17 sen sampai 18

sen, tetapi ini perubahan dari yang tadinya 30-32 sen bisa menjadi 18-17 sen, artinya bisa mengurangi sekitar 50%.

Nah, untuk itu kami mohon dukungan dan arahan dari Bapak/Ibu Komisi VII DPR RI. Kami terbuka untuk segala masukan, harapan kami agar segala perencanaan ini bisa berjalan dengan lancar, kami juga dengan adanya tantangan ini tidak akan memperlemah kami, tetapi bahkan memperkuat dari PLN.

Hujan deras di Mandalika,  
Pawang datang berhenti seketika,  
Terima kasih perhatian dan dukungannya,  
Agar PLN dapat melayani sepanjang masa.

*Wabillahi taufik wal hidayah,  
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI (BAMBANG HARYADI, S.E./F-P.GERINDRA):**

Bu Rara nya *nggak* disebut ini kan.

Terima kasih Pak Dirut, luar biasa Pak Dirut.

Jadi pertama adalah, ada satu yang harus kita titik beratkan. Ada, kita sama-sama tahu antara kementerian, dalam hal ini pemerintah maupun badan usaha, itu sama-sama tujuannya adalah untuk mensejahterakan rakyat, tapi di antara dua ini, antara regulator dan eksekutor, dalam hal ini BUMN adalah eksekutornya, tidak boleh saling mematikan. Permen yang dibuat oleh pemerintah tidak juga untuk bertujuan untuk mematikan Badan Usaha Milik Negara. Jadi kalau tadi paparan Pak Dirut bisa membangun PLTS Atap di luar kapasitas yang dibutuhkan, itu sama saja dalam waktu dekat bentar lagi PLN hanya ngurusin ini saja, mobil listrik ya. Karena lama-lama pengguna terbesar adalah masyarakat. Masyarakat bisa masyarakat perorangan ataupun masyarakat perusahaan kan. Kalau perusahaan membangun sendiri ya udah lewatlah, *nggak* usah lagi ada PLN. Nah, inilah yang harus kita pikirkan, bagaimana ke depan pemerintah bisa juga bijak dalam mengambil kebijakan.

Dan yang kedua adalah, kita titik beratkan terkait program PLN. PLN juga jangan juga membuat program yang, ini maaf Pak Dirut, kita harus pinjam istilahnya ini, pegadaian, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Jadi tadi kompor induksi, saya dari awal kurang sepatutnya Pak Dirut. Karena kompor induksi ini jangan hanya kita berpikir kompornya saja. Masyarakat di bawah, minyak aja susah payah mereka ini kan, apa lagi entar kompor, induksi, dia harus ganti semua lah Pak. Pancinya ganti, kan, teflonnya ganti, itu PLN bisa *nggak* mengganti itu? Wajannya ganti kan. Jadi ini yang jadi berat.

Menurut saya, saya pikir PLN lebih baik fokus kepada program yang lebih langsung menyentuh, dan emang ini tidak bersentuhan dengan apa ya, peningkatan pembiayaan dari masyarakat itu sendiri. Misalnya ya, kerja sama

dengan industri motor. Saya sudah pernah sampaikan beberapa direksi waktu itu ngobrol kan. Motor, tapi kerja sama yang punya *brand* Pak, jangan kerjasama dengan universitas yang walaupun kita tahu ini nih. Karena rakyat Indonesia itu kalau nggak merek tertentu nggak percaya, Pak. Coba kerjasama Suzuki, Yamaha, Honda, kan. Supra diganti motor listrik, apalagi Suzuki itu? Suzuki Mio ya? Eh Yamaha Mio, diganti motor jadi listrik. Saya yakin itu jauh lebih populer, karena itu lebih ini. Mau berangkat kantor, pulang kantor nyolok, kan. Kalau panci, entar Pak Dirut malah dimaki-maki emak-emak loh. Bisa-bisa di rumah pun dilempar panci juga.

Jadi saya pikir itu Pak Dirut. Harapan saya dengan direksi baru kan. Saya dulu pernah soalnya kritik Pak Dirut. Saya bilang, kalau kita diskusinya ntar Pak Wadil jadi dirut baru enak. Lah sekarang sudah jadi dirut, jadi kita diskusi, karena dia pasti bisa memutuskan, kan gitu. Kalau Dirut yang lama kan kita putuskan di sini di luar *enggak* putus juga. Nah, harapan saya itu. Mungkin paparan Pak Dirut bisa didalami oleh teman-teman Anggota Komisi VII yang bisa juga memperkuat PLN ke depan, dan juga mencari jalan keluar ke depan, bagaimana PLN bisa jadi satu pondasi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sektor kelistrikan.

Saya dari meja Pimpinan, saya persilakan satu-persatu dari seluruh Anggota Komisi VII yang hadir secara fisik dulu. Dari fraksi pertama adalah Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Ibu Meri? Mercy, belum ganti Bu Meri.

**F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):**

Iya, terima kasih Pak Bambang.

Ini setelah hampir dua bulan istirahat ya, karena kesehatan baru hari ini aktif masuk di lagi dalam rapat-rapat.

Pak Dirut dan seluruh jajaran,  
Pak Wakil Ketua dan Pimpinan, dan seluruh kawan-kawan yang saya hormati,

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*, dan  
Salam sejahtera bagi kita sekalian,

Sebenarnya saya mau mulai dari halaman agak ke belakang saja, baru kita mungkin ke depan ada beberapa poin. Kita konsentrasi pada halaman 23, fokus utama PLN tahun 2022. Sebelum saya mau masuk di yang poin-poin yang sangat detail-detail ini, saya ingin mungkin bisa interaksi sebentar. Untuk efisiensi sendiri, sebenarnya PLN untuk menurunkan efisiensi, untuk memperkuat efisiensinya, proses teknis nonteknis itu hendak turun sampai di angka berapa persen Pak? Karena itu berdampak besar sekali se-Indonesia ini,

Waktu paparan Pak Dirut yang lama, itu kalau dikompensasi dengan rupiah, kalau *enggak* salah itu sampai dengan berapa, 38 triliun atau berapa triliun Hampir 1/2 atau 3/4 dari biaya subsidi kita. Jadi apa gunanya kita memberikan subsidi kalau hanya membayar *losses*? Kalau hanya menutupi *losses*, teknis nonteknis ini. Kan tidak *fair*, Pak. Kita tempurnya itu habis-habisan di Badan Anggaran, dan kita selalu minta keyakinan sungguh dari PLN. Seberapa kuat PLN hendak menurunkan *losses* ini? angkanya bolak-balik aja ke 8, 9 seperti itu ya. Dan kita ingin tahu kepastian ini arahnya ke mana, karena ini akan berdampak juga terhadap seluruh fase transisi dan yang lain-lain.

Hari ini kita bicara surplus pak, kita juga bicara tentang peralihan atau transisi energi dari fosil ke EBT. Kalau *losses* enggak turun kan *enggak* masuk akal Pak, *really* tidak masuk akal. Jadi mestinya ini di-*breakdown* Pak, sehingga kita *clear* juga di sini di Komisi VII. Kita main-main angkanya menjadi enak. Dari komisi kita menuju ke Badan Anggaran untuk 2023, tentang kita. Karena kita tahu bahwa anggaran yang kita pertarungkan sampai di Banggar ini *clear* dan benar-benar dia memberikan dampak bagi perbaikan PLN di dalam. Kan kata kasarnya, kalau efisiensi tidak terjadi, asumsinya, konsumsi konsumen. Konsumen yang membayar semuanya Pak, mengkompensasi inefisiensi di dalam PLN. Kan mestinya kan *fairness* juga dalam situasi ini. Itu yang pertama, Pak.

Yang kedua Pak, kita bicara tentang *supply and demand*. Saya lihat disini Pak, untuk halaman 3 *demand forecast* RUPTL, baik yang untuk 2024, 2028 dan 2030, kemudian mengalami *demand forecast* turun karena sejumlah variabel-variabel, entah pandemik dan yang lain-lain. Buat saya, mestinya juga harus ada skenario optimis Pak, bahwa yang skenario optimis di angka, yang punya RUPTL 2015-2024, yang kita gunakan hari ini skenario paling tidak optimis. Kita, betul bahwa pandemi Covid ini dia *uncertainty, unpredictable*, dia bisa fluktuatif. Tetapi karena ini proyeksinya sampai dengan 10 tahun ke depan, maka mestinya kalau dibikin skenario khusus untuk skenario *demand forecast* ini, mestinya juga ada sejumlah apa namanya, kalau saya bilang skenario yang optimislah.

Skenario optimis dalam pengertian bahwa, saya membayangkan ya, pertumbuhan penduduk naik terus, dia menggunakan apa ya? Deret ukur atau deret hitung, gitu. Jadi dia naiknya berkali lipat Pak. Yang kedua, pertumbuhan apa namanya, pertumbuhan industri kita juga naik, tidak turun. Daerah-daerah yang tadinya tertinggal, terbelakang, dan lain-lain, naik. Dan mestinya juga dikonfirmasi dengan RUED (Rencana Umum Energi Daerah) yang sementara ini sementara di *push* habis-habisan oleh Dewan Energi Nasional kita, dan di sana keluar angka-angkanya dengan proyeksi-proyeksinya yang betul-betul, karena mereka menggunakan banyak ahli bekerjasama juga dengan PLN dan banyak pihak juga untuk menghasilkan ini. Sehingga *forecast* ini mudah-mudahan juga bisa memberikan angin segar juga untuk kita gitu loh. Untuk apa namanya, harapan *demand* kita ke depan.

Karena, kalau *demand* dibuat diangka yang apa ya, konvensional, maka perhitungan kita untuk *supply* juga konvensional Pak. Sudah pasti. Kan hitungannya ini kan rumus dasarnya, kalau perhitungan *forecast demand*-nya

konvensional atau rata-rata air saja, tidak optimum, maka perhitungan *supply*-nya juga rata-rata air. Maka yang terjadi, kita kebingungan hari ini bicara tentang *supply* dan lain-lain. Kan mestinya ini dia menjadi satu mata rantai, dari hulu ke hilir. Betul memang domain dari PLN adalah menyediakan listrik *mandatori* untuk seluruh wilayah tanpa pandang bulu, tetapi kan mestinya juga di-*compare* dengan setiap wilayah dengan perkembangannya. Kalau dibikin rata-rata seperti begini, maka hari ini kita bicara kok rasa-rasanya ruangan ini kok *hopeless* banget gitu loh, kesannya terhadap PLN hari ini.

Yang kedua, jadi mungkin kita butuh juga ya pendekatan-pendekatan untuk hitungan-hitungan *demand* yang jauh lebih apa namanya, lebih greget gitu loh. Dengan menghitung pemindahan ibu kota negara dan seterusnya, gitu loh. Pasti akan banyak terjadi perubahan-perubahan yang cukup mendasar.

Yang kedua, saya juga ingin bicara tentang apa namanya, *roadmap*, ini halaman 5. *Roadmap* pengembangan EBT di tahun 2021 sampai dengan 2030. Jadi ada penambahan pembangkit EBT, lebih besar 51% dari pembangkit fosil. Penambahan pembangkit EBT lebih besar 51,6% dari pembangkit fosil. Pertanyaannya hari ini, di dalam tubuh PLN sendiri, bagaimana menskenariokan PLTD-PLTD lama ini? Karena kalau pun dikirim habis juga ke Indonesia Timur, pasti tetap masih *overstock*. Untuk semua yang besar-besar, dari Jawa, dari Jamali, kemudian dari Sumatera, dari Kalimantan, dan lain-lain. Jadi ini juga jadi catatan bersama untuk kita.

Yang berikut, kami ingin dapat kepastian Pak. Kalau kita bicara tentang *neutral carbon* hari ini, kita bicara tentang transisi energi, yang ada di belakang kepala PLN sendiri, ini biar supaya sama dengan kami yang ada di Komisi VII. Apakah *totally net zero* ataukah *neutral*? *Neutral carbon*? Jadi dia bisa *offset*, dia bisa *kept and trading*. Beda dengan memang betul-betul dikonvert langsung dari PLTD ke EBT. Jadi kita *clear* Pak. Kan kita bicara kan sampai 2060 itu kita *neutral carbon*. Yang dimaksudkan dengan *neutral carbon* itu 100% menggunakan EBT ataukah rancangan yang seperti apa ini yang harus keluar, jadi kita juga jadi *clear* gitu loh.

Ada wilayah-wilayah tertentu yang sampai mati sekalipun, satu lautan Indonesia kering sekalipun, agak sulit untuk dia beralih ke EBT, agak sulit. Karena curah hujan tinggi, dan yang lain-lain, dan seterusnya. Wilayah-wilayah, pulau-pulau kecil yang begitu rapat bakau-bakaunya, agak susah juga gitu loh. Jadi kalau kita bicara menuju ke *neutral carbon a hundred percent net zero emission*, ini juga tidak *fair* untuk wilayah-wilayah yang modelnya pulau-pulau kecil seperti ini. Kita bisa pakai, di pulau-pulau kecil sebenarnya pakai yang model begini jauh lebih bagus gitu loh, tapi ada nilai-nilai yang memang betul-betul nggak memungkinkan. Ada sejumlah wilayah-wilayah yang di atas gunung, yang begitu lembab, itu tidak mungkin pakai ini barang. Jadi mari kita bicara *fair-fair* saja, berdasarkan fakta, jadi kita hitung-hitungannya menjadi enak gitu loh.

Konsep netral karbon atau konsep *net zero* yang dimaksudkan oleh PLN, itu berapa besar kita harus konvert atau kita langsung bangun baru

misalnya, untuk menghitung-hitung EBT yang akan kita gunakan? Kalaupun misalnya tutup semua energi batubara kita, apakah betul-betul tutup seluruh energi batubara? Ini kita harus bicara apa adanya, sampai dengan 2060. Jadi, hitung-hitungan fakta untuk anggaran, untuk perencanaan dan lain-lain menjadi lebih masuk akal, daripada kita bicara dalam angka-angka ideal seperti begini.

Jadi, buat saya mungkin itu apa namanya, kegelisahan saya dari tadi saja Pak Darmo, gitu loh. Apa konsepnya sama nih antara kita semua ketika duduk bicara tentang netral karbon atau *net zero* ini, ini sudah *clear* di antara kita semua? Kalau kita memang mau nol kan, tidak lagi menggunakan *totally, at all*, fosil, semuanya dialihkan, maka hari ini PLN secara skematik dan organisatoris berubah total. Suka atau tidak suka, suka atau tidak suka. Kita tidak bisa lagi memberikan hak apa harapan-harapan palsu lagi ke wilayah-wilayah tertentu, atau masih mau main-main lagi dengan BBM dan yang lain-lain, gas dan seterusnya. Sudah kita bicara ini konkret-konkret gitu loh, jadi kita nendangnya juga dari Komisi VII *clear* gitu loh.

Yang berikut, peta sebaran seluruh EBT se-indonesia nih. Di dalam RUPTL masing-masing provinsi, kita baca punya wilayah kita masing-masing gitu loh. Saya jadi bertanya, apa benar ini akan terbangun? Sementara kalau di-*convert* dengan anggaran berapa? 3.000 triliun sekian gitu loh. Jadi kalau dirata-ratakan setiap tahun kita harus cari sekitar berapa ratus triliun pertahun untuk bisa menjawab angka-angka yang dipaparkan oleh PT PLN sendiri.

Yang terakhir Pak, yang terakhir pak, khusus untuk wilayah-wilayah yang berbasis kepulauan, atau yang lebih banyak ada di kawasan Indonesia Timur, beberapa di kawasan barat, seperti Babel, kemudian Kepri, dan yang lain-lain ini. Pertanyaannya adalah, ini biar kita *clear* juga ya Pak ya. Hasil yang paling terakhir, *updating*, kemarin saya koordinasi dengan Dirjen Kelistrikan, mungkin sudah dikoordinasikan dengan PLN. Saya dapat *update* paling terakhir tentang 97 PLTD mangkrak yang sementara dalam proses, baik Maluku maupun Maluku Utara, seperti itu.

Jadi, sebagian besar itu relokasi penambahan *great interconnecting*. Saya ingin tanya Pak, mungkin hari ini untuk bukan saja MMU, tetapi semua wilayah hari ini yang mengalami nasib sama dengan MMU hari ini, kita minta juga tolong dibuka Pak. Apa yang terjadi ketika kami turun ke masyarakat, ini disosialisasikan, kegelisahan cukup luar biasa oleh masyarakat kecil yang ada di wilayah wilayah perbatasan pulau-pulau terluar ini Pak. Kalau ini relokasi, artinya mesin-mesin bekas pakai yang sudah dipakai di mana-mana kemudian masuk di wilayah-wilayah yang jauh, apakah ini tidak menimbulkan persoalan baru Pak? Bagaimana biaya pemeliharaannya, akan menjadi *high cost*, dan seterusnya, dan seterusnya, gitu loh. Jika memang ini harus digunakan, pastikan juga yang berkaitan juga dengan urusan ketersediaan BBM-nya.

Pak, di tempatnya Blok Marsela hari ini, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Saya minta maaf teman-teman, memang agak panjang. Di Kabupaten Kepulauan Tanimbar hari ini, di beberapa wilayah itu pak, dibikin *hybrid* Pak. Jadi ada PLTS-nya, ada yang berbasis BBM-nya Pak. Tetapi yang terjadi hari ini adalah, *nggak* nyala-nyala pak. Beberapa kabupaten Tua hari ini,

listrik masih tetap 12 jam, ada yang 18 jam, pemerintah beli mesin sendiri dari APBD Kabupaten, alokasi minyak juga Pak, listrik masih *enggak* jalan. Saya koordinasi dengan GM, katanya beberapa mesin rusak, mesin baru dibelikan langsung oleh pemerintah, dan masih lagi kejadian yang sama. Jadi situasi seperti begini, saya minta untuk semua wilayah-wilayah yang menggunakan mesin-mesin bekas pakai, tolong di-*tracking* ulang Pak, karena kita terus-terusan akan menghadapi situasi yang seperti begini di wilayah-wilayah yang sulit berbasis kepulauan seperti ini.

Jadi, kalau di Jepang waktu kita pergi, waktu itu Pak Menteri dulu itu masih jadi Dubes Pak. Pembangunan di Jepang kalau di wilayah-wilayah perbatasan, *the best of the best, quality* yang paling terbaik, supaya tidak datang bolak-balik. Karena, itu investasinya besar, dengan biaya tinggi, membangun di wilayah-wilayah sulit, wilayah-wilayah terluar, 3T, dan lain-lain. Jadi mestinya semangat itu juga ada di kita. Bukan semakin keluar, semakin kualitasnya turun, semakin semuanya menjadi tidak apa namanya, *visible* untuk kelayakan operasionalnya.

Ini hanya catatan, *insight* dari saya saja, mudah-mudahan bisa menjadi masukan kepada PLN.

Terima kasih pak, saya kembalikan ke Pimpinan.

**KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-P.NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Iya, tadi beberapa catatan luar biasa dari Bu Mercy, karena memang.

**F-P.GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):**

Pak Ketua.

**KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-P.NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Iya, dilanjutkan, dipersilakan yang terhormat.

**ANGGOTA KOMISI VII:**

Gilirannya, gilirannya per fraksi.

**F-P.GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):**

Atau langsung saya saja ya, saya mau pulang.

**KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-P.NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Iya *oke, oke, oke*. Iya, silakan Pak Golkar, Pak Bambang Patijaya.

**F-PG (BAMBANG PATIJAYA, S.E., M.M.):**

Baik, terima kasih.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*  
Selamat sore,  
Salam sejahtera untuk kita semua,  
*Om swastiasti,*  
*Namo buddhaya,*  
Salam kebajikan,

Yang saya hormati Pimpinan beserta rekan-rekan Anggota Komisi VII, baik hadir secara fisik maupun *virtual*, kemudian Pak Darmo beserta jajarannya,

Tadi hal-hal yang penting itu sudah terwakili semua oleh Bu Mercy, terima kasih, Bu. Jadi yang sifatnya isu-isu nasional, apa kata Ibu Mercy, apa perkataan Bu Mercy, itu juga kata saya. Jadi itu mempersingkat pembicaraan, itu menghemat sekitar kira-kira 10 menit dari saya.

Kemudian yang kedua, berarti saya menukik saja kepada persoalan dapil saja Pak Darmo. kepada persoalan dapil. Saya Dapil Bangka Belitung. Jadi memang di Bangka Belitung ini persoalan listrik ini, persoalan daya memang masih menjadi satu masalah. Di dalam dua bulan terakhir ini pun *blackout* sudah dua kali. Dalam proses itu saya berkoordinasi terus dengan GM, juga ada komunikasi dengan Pak Wiluyo, kemudian juga dengan Pak Dilumase juga ada komunikasi ya.

Jadi pertama, persoalan yang ada di pulau Bangka. Memang sekarang ini ada upaya daripada PLN untuk bagaimana mengatasi krisis daya itu antara yang paling cepat dengan proyek kabel laut Sumatera-Bangka. Dan ini betul-betul menurut saya yang menjadi apa, menjadi solusi paling cepat. Saat ini kapasitas daya mampu PLN di Pulau Bangka itu 92 megawatt, beban puncaknya 90. Jadi tersisa hanya 2 megawatt saja, dan ini betul-betul satu titik yang sangat kritis. Karena kenapa? Misalkan kemarin, ketika batubaranya kualitasnya *ndak* bagus, kemudian juga *handling* dilapangnya karena faktor hujan dan sebagainya, mempengaruhi kapasitas daripada PLTU, sehingga kemudian *output*-nya tidak sesuai dengan yang diharapkan, yang terjadi *blackout*, seperti itu.

Nah Pak Darmo, Pak Wiluyo juga, harapannya adalah ini menjelang bulan ramadhan dan juga Idul Fitri. Orang Bangka ini agak sensitif dia persoalan mati listrik ini. Saya bercerita di masa lalu. Misalkan di tahun 2015, ketika saya masih menjadi Ketua KMB Bangka Belitung, saya juga pernah memimpin demo bakar-bakar di kantor PLN Pak pada saat itu, dan hampir saja Kantor PLN terbakar Pak, pada saat itu tahun 2015. Dan saya bilang, pada saat itu saya memang agak sedikit nakal Pak, kalau sekarang sudah agak tertib. Karena waktu itu cuman di sampaikan Pak Kapolda, "Dek, demo boleh, bakar-bakar bolehlah, tapi apinya jangan besar-besar lah" Pak Kapoldanya, Pak Gatot waktu itu.

Ini yang menjadi harapan, jadi bahwa proyek kabel PLN Sumatera-Bangka ini harapannya bisa terealisasi dalam waktu dekat ini. Dan menurut informasi dari Pak Wiluyo, progresnya ini sebetulnya sudah di ujung-ujung terus Pak ya, jadi sudah klimaks gitu, loyo lagi, tapi maksudnya sudah di ujung ini Pak. Ada aja masalahnya. Masalah teknis-teknis yang saya sih bisa mengerti, tapi masyarakat kalau di apa namanya, di apa namanya Instagram, di Facebook, itu nge-tag saya melulu itu, nge-tag nama saya terus gitu kan. Jadi urusan minyak goreng kita di tag namanya, urusan apapun, pusing kepala. Jadi kita ini kan dianggap maha tahu dan maha penyelesai permasalahan, tempat mengadu.

Tadi pun saya di, Pak Ketua saya dilaporkan lagi masalah Pupuk Kohe, pupuk subsidi Bangka Belitung kecil, ngadu lagi ke saya, ngomong setengah jam, pusing kepala saya mendengarnya. Tapi ini mau, tidak mau, seperti itu. Jadi apapun kita harus menjadi, menjadi apa, menjadi *problem solver* untuk masyarakat.

Jadi dengan adanya kabel ini untuk di Pulau Bangka, mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi. Karena kenapa? Perkembangan dunia usaha juga tinggi, tambak udang misalnya. Tambak udang ini satu sektor yang tidak diantisipasi oleh PLN Bangka Belitung. Di dalam satu tahun saja peningkatannya luar biasa. Semua perlu apa namanya, listrik untuk menjalankan apa namanya, tambak udangnya. Dan kemarin salah satu solusi adalah, kami mengajak bicara kepada kawan-kawan asosiasi tambak udang, agar bagaimana berkontribusi di dalam penyelesaian *blackout*, misalnya beberapa tahun yang lalu, sehingga mereka juga mulai menggunakan genset ketika malam, sehingga beban itu berbagi begitu. Itu di Pulau Bangka Pak Darmo.

Kemudian bagaimana di Pulau Belitung? Kalau Pulau Belitung ini juga sama, ketika reses kemarin saya juga berkunjung. Saya mengunjungi apa, PLTU di sana dan juga mengunjungi PLN Pulau Belitung. Seolah-olah memang kelihatannya *nggak* ada masalah, tetapi menurut saya juga perlu diantisipasi. Sekarang ini daya mampunya 75, daya apa namanya, maksimal beban puncak itu 49,3 megawatt. Nah cuman masalahnya adalah, jangan sampai ketika mendekati pelaksanaan presidensial G20, ada rapat menteri-menteri ya, itu di Pulau Belitung, jangan sampai listrik menjadi masalah. Ini yang saya sampaikan, ya tolong dipikirkan mitigasinya, jangan sampai hal-hal seperti ini membuat malu misalkan. Mungkin kalau pada area, pada area lokasi ya, mungkin ada genset, enggak apa-apa, cuma kan malu kalau orang keluar ternyata Kota Tanjung Pandan itu mati listrik, *nggak* lucu gitu loh. Nah ini hal-hal yang menurut saya perlu diperhatikan.

Dan sekali lagi juga sama, informasi yang sampaikan bahwa, sama di Pulau Belitung juga berkembang sektor tambak udang. Nah, ini juga perkembangannya pesat. Saya sampaikan, jangan lengah dengan *spread* misalkan 20 megawatt ini, ini tiba-tiba setahun saja bisa habis ini barang, *set* gitu. Karena satu tambak udang itu bisa saja 1 megawatt, begitu. Kalau ada 20 tambak udang saja udah habis ini barang, kan seperti itu.

Saya pikir demikian ya, yang lain-lain, isu-isu nasional sudah ditanyakan Ibu Mercy, apa kata beliau itu juga kata saya, biar kita mempersingkat waktu.

Demikian.

Sungguhlah semak padang ilalang,  
Takkan habis, itu masih bersih,  
Omongan saya tak pala panjang,  
Saya akhir sekian dan terima kasih.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*  
Selamat sore,  
Salam sehat semua,  
*Om Shanti Shanti,*  
*Namo buddhaya,*  
Salam kebajikan.

**KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-P.NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Luar biasa Pak Bambang Pati ini, lengkap. Kalau istilahnya apa, nasi goreng ya nasi goreng istimewa lah kurang lebih.

Dilanjutkan tadi Pak Ramson yang terhormat, dipersilakan.

**F-P.GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):**

Terima kasih, dari Gerindra ya.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*  
Salam sejahtera untuk kita semuanya,  
Pak Ketua dan rekan-rekan Anggota yang terhormat,  
Pak Dirut dan direksi semua yang saya hormati,

Tadi juga sudah lengkap ya, yang nasional disampaikan Bu Mercy, program dapil saja.

Pak Dirut,

Ini ada pertanyaan mungkin dari apa, di agenda rapat ini menanyakan, andai kata Komisi VII DPR RI tidak memperjuangkan ke pemerintah, DMO harga. Kalau DMO *volume*, kalau sudah harga mekanisme pasar global tentunya *nggak* terpengaruh lagi DMO *volume*.

Andai kata tidak diperjuangkan oleh Komisi VII DPR RI, tidak ada keputusan DMO harga, USD 70 per metrik ton, itu kira-kira penambahan potensi kerugian PLN per satu bulan, sekitar 5 bulan ini berapa itu Pak Dirut? Ini nanti kalau *nggak* keburu dijawab, tertulis saja. Jadi supaya rekan-rekan Komisi VII DPR RI tambah mengetahui hasil dari perjuangan rekan-rekan

Komisi VII DPR RI dari sisi kebijakan. Karena kalau operatornya kan Pak Dirut, dan Pak Direksi, dan semuanya. Jadi, berapa potensi kerugian yang akan terjadi? Itu yang pertama.

Yang kedua, tadi mengenai pengembangan energi baru terbarukan. Itu sudah tadi dijelaskan, itu sebenarnya sudah saya prediksi Pak Dirut, apa yang akan dialami oleh PLN. Karena itu sekarang dialami oleh CPO atau juga produk minyak goreng yang, kalau itu nggak langsung dibebankan ke rakyat sehingga naik 100%, tidak ada demo dari rakyat Pak Dirut, tapi kalau listrik dinaikkan 50%, mungkin akan, rakyat akan demonstrasi. Di CPO waktu CPO-nya lagi USD 500 per metrik ton di pasar global tahun 2018, itu dari pengusaha CPO berjuang untuk bisa masuk ke *biodiesel* energi terbarukan, tetapi sesudah harga CPO di pasar global sekitar USD 1.300 per metrik ton, sekarang jadi beban juga bagi Pertamina mencampur CPO dengan solar atau *be thirty*, yang tadinya kita lagi menggebu-gebu menjadi *be hundred*. Sekarang 8 juta metrik ton konsumsi biodiesel yang harganya sangat tinggi dan menjadi sulit dapat barangnya, dapat CPO-nya. Itu problem.

Ini soal program kebijakan pak, jadi bukan soal *financial, cost and benefit*, tapi *political, cost and benefit* sangat berpengaruh terhadap *financial, cost and benefit* yang bisa membangkrutkan suatu korporat. Jadi termasuk juga *oversupply* ini tadi. Data-datanya tadi sudah dikemukakan, saya juga punya data-data itu, tidak saya ulangi lagi. Ini memang yang *problem* dihadapi oleh operator.

Nah seperti tadi, kembali ke CPO. Sekarang pada harga US dolar 1.300 per metrik ton harus dicampur untuk energi terbarukan biodiesel 8 juta, sulit dapat karena harganya tinggi. Kalau itu yang diikuti, berarti harga solar akan sangat tinggi. Nah, ini jadi beban juga untuk korporat. Ini analogi terhadap juga PLN, padahal produk CPO kita 54 juta metrik ton per tahun. Di satu sisi, untuk pangan saja hanya 8,7 juta metrik ton, tapi bisa langka. Sehingga itu suatu taktik untuk menjadi naik harga 100%. Ini *problem-problem* kebijakan yang dialami oleh, yang dihadapi oleh operator. Begitu juga yang tadi dikemukakan Pak Dirut.

Ini saya hanya mendoakan saja, semoga PLN yang lagi dipimpin Pak Darmo tidak terjadi krisis keuangan PLN. Karena di satu sisi tadi, karena tidak mungkin PLN membantah kebijakan pemerintah, apalagi pemegang saham. Sama saja waktu ke Pertamina saya sampaikan ke dirutnya, jangan coba-coba membantah keputusan pemegang saham. Urusan mengkritisi pemegang saham urusan DPR lah. Karena kalau nggak repot juga. *Alhamdulillah* Dirutnya Bu Nicke langgeng juga 4 tahun. Saya kasih nasehat Pak Dirut, karena yang sebelumnya hanya 8 bulan yang dari Medan lagi. Baru kali itu Dirut Pertamina dari Medan, 8 bulan langsung terbang dia. Jadi, karena ya nggak bisa dibedakan kan, antara hitung-hitungan *financial, cost and benefit* dengan *political, cost and benefit*. Dia mau main-main sama pemegang saham. Sekali tanda tangan lewat, karena banyak calon yang bisa. Saya juga bisa calon dirut misalnya, apalagi Pak Ketua kita, lebih pantas lagi jadi calon Dirut Pertamina misalnya. Iya kan?

Jadi itu Pak Dirut, saya hanya mendoakan saja. Artinya piawai dan dapat *ridho* untuk mengelola PLN dengan baik, sehingga membuat keseimbangan *financial, cost and benefit*-nya bisa membuat keseimbanganlah, bisa berjalan dengan baik. Itu saja harapan saya Pak Dirut. Kalau yang tadi hitung-hitungan itu bisa dijawab tertulis ke, melalui Komisi VII DPR RI.

Jadi selamat nih jadi dirut pak, karena saya baru kembali lagi di sini. Dulu saya 6 bulan bantu Pak Menteri Kesehatan, percepatan vaksinasi, membantu Pak Budi Gunadi. *Alhamdulillah* berhasil vaksin pertama, kedua, sekarang sudah ke *booster*, jadi saya dipindahkan lagi ke energi.

Terima kasih, Pak Ketua.

*Wabillahitaufik wal hidayah,  
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-P.NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):**

*Walaikumsalam warahmatullah wabarakatuh.*

Luar biasa Pak Ramson. Masa saya layak menjadi Dirut PLN gitu?

**F-P.GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):**

Pertamina.

**KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-P.NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Oh Pertamina.

**F-P.GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):**

Karena saya menghormati Pak Darmo, pas disitu, gitu dong.

**KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-P.NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Iya, oke, iya.

**F-P.GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):**

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-P.NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Luarbiasa.

Jadi betul Pak Dirut, bagaimana, bayangkan kalau tidak ada namanya DMO itu kaya apa, gitu loh. Apalagi sekedar DMO *tok*, kalau tidak di-kept dengan harga 70 dolar per ton. Katakanlah di-kept pun akan menjadi dinamika perubahan luar biasa kalau tidak ada formula lebih lanjut yang namanya DMO gotong royong. Ini yang sedang kita rumuskan, minggu depan kami akan rapat dengan Kadin, dengan juga Marinvest ya, karena Pak Luhut ini kan terus mengambil peran terus. Ya *it's oke* lah, yang penting demi kemaslahatan pertama, eh bersama, kenapa tidak.

Dilanjutkan dari Nasdem, Bapak Rico Sia. Sehat sekali kayanya Pak Rico ini.

**F-P.NASDEM (RICO SIA):**

Siap, terima kasih Pimpinanku yang ganteng.

**KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-P.NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Dipersilakan.

**F-P.NASDEM (RICO SIA):**

Siap, terima kasih Pimpinan.

**KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-P.NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Oh sebentar, sebelum dilanjutkan. Pak.

Ini sudah memasuki maghrib ya, apa, saya minta pertimbangan forum, apa kita *break* bangsa lima belas menit untuk maghrib atau siapa yang mau *shalat* lantas mengalir begitu saja? Saya kira yang kedua saja yang kita ambil ya? karena kita juga ter apa, tertuntut waktu. Sekali lagi yang lanjut saja. Jadi ini sudah masuk maghrib, bagi yang mau shalat maghrib dipersilakan untuk terus mengambil tempat untuk di belakang.

Iya, dipersilakan Kaka Rico.

**F-P.NASDEM (RICO SIA):**

Baik terima kasih Pimpinan, terima kasih rekan-rekan sekalian, baik yang hadir secara fisik maupun *virtual*.

Sama seperti dengan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Mercy, Pak Bambang, maupun Pak Ramson. Secara nasional sepakat bahwa kita semua sangat prihatin dengan adanya *oversupply*. Kalau kita masuk, saya mungkin langsung ke dapil, terkait dengan apa yang juga sudah disampaikan oleh Ibu Mercy, khususnya terkait dengan diesel.

Mesin diesel yang ada di tempat kita, mungkin di Papua, maupun Papua Barat, juga, mungkin lama kelamaan juga akan pelan-pelan ada penyusutan di sana ya. Nah saya ingin tanya, mungkin interaksi, interaksi sedikit Pimpinan dengan Pak Direktur, Pak Adi. Mungkin langsung dengan Pak Adi ya? Izin Pak Dirut.

Pak Adi, mungkin menurut Pak Dirut, menurut Pak Adi, apakah lebih baik di sana, di Papua, maupun Papua Barat, dengan negara kepulauan, gunung, laut dan lain sebagainya, apakah lebih bagus kita bikin PLTS dan sekaligus dengan apa yang turbin, digabung jadi satu untuk wilayah-wilayah tertentu, sehingga tidak menambah beban yang berkelanjutan untuk jangka waktu yang panjang.

Mohon interaksinya mungkin.

**DIREKSI PT. PLN PERSERO (ADI):**

Baik Pak Rico, terima kasih, pertanyaannya sangat menarik Pak.

Dalam membentuk suatu sistem kelistrikan terutama untuk yang di Papua, Papua Barat, itu memang saat ini untuk mengejar rasio elektrifikasi ada beberapa program dari pemerintah, salah satunya adalah dengan membangun *spell*, kemudian pakai PLTS, pakai apa, yang pakai baterai yang dipasang di rumah-rumah. Memang itu jangka menengah Pak, menurut saya jangka menengah, tetapi ke depan itu PLN selalu memperhatikan potensi-potensi yang ada di daerah, salah satunya adalah PLT Mikrohidro. Nah, ini yang harus kita cari terus pak sumber-sumbernya. Karena kalau mikrohidro ini bisa jangka panjang, Pak. Ya 100 KW, 150 KW, yang ada di lokasi-lokasi, itu selalu kita cari.

Kemudian untuk yang lainnya apabila terpaksa tidak ada, iya itu PLTS yang kita *hybrid* Pak, nanti dengan *genset* tentunya. Memang kalau PLTS baterai dan *genset*, itu merupakan suatu hal yang ideal untuk yang memang benar-benar tidak ada sumber-sumber lain. Tetapi, untuk yang jangka panjangnya Pak, kita tetap mencari mikrohidro, terutama yang ada di Papua dan Papua Barat.

Saya kira banyak sekali sumber-sumber yang belum kita temukan. Nah, ini yang saat ini sedang kita studi untuk kita cari Pak.

Demikian Pak Rico, terima kasih.

**F-P.NASDEM (RICO SIA):**

Baik, terima kasih Pak Adi atas penjelasannya.

Jadi mungkin Pak Dirut itulah, apa yang disampaikan oleh Pak Adi, itulah apa, aspirasi dari masyarakat kami. Jadi mohon supaya kalau boleh itu ditampung, dan itu bisa diperjuangkan Pak, sehingga Papua itu tidak hanya

menjadi bagian dari Indonesia saja terkait dengan tadi *oversupply* itu, tapi juga ada jalan keluar lain, seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Adi. Mudah-mudahan Pak Adi bisa selama-lamanya di sana, supaya selesai itu Papua, Papua Barat.

Terima kasih, Pimpinan.

Tapi, tapi, kalau boleh jadi dirut juga nih suatu saat nih kalau sudah berhasil di sana.

Terima kasih Pimpinan, terima kasih rekan-rekan semuanya.

**KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-P.NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Iya.

**F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):**

Pak, Pak Ketua.

**KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-P.NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Iya?

**F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):**

Kalau boleh melanjutkan punyanya Pak Rico.

Saya mungkin izin ya Pak Dirut, kalau boleh saya lanjutkan dengan Pak Adi. Kan kalau bicara EBT, ini kan kita bicara soal *intermittent* apa namanya, sistem juga yang harus kita apa namanya, cari solusinya gitu Pak Adi. Karena, di sebagian wilayah-wilayah tertentu ada yang mungkin bisa menggunakan, ada yang bisa menggunakan apa namanya mikrohidro, itu yang memang dia punya sumber air ada. Tapi wilayah-wilayah yang ini, ini karena kita sudah bicara ya tentang basis EBT. Untuk wilayah-wilayah yang berbasis kepulauan, yang rata-rata pulau-pulau kecil yang di atas bakau-bakau itu, pak rata-rata itu pulau kering Pak, pulau-pulau kering. Kita nggak bisa tanam apa, apa saja nggak bisa kita tanam, semuanya nggak bisa kita tanam. Kalau harus mau cari air, itu ketok itu karang-karang itu, 3 hari Pak, perempuan dan anak-anak itu baru dapat air.

Jadi saya membayangkan, kalau misalnya untuk penyiapan *supply* kelistrikan di model-model wilayah seperti begini, mungkin memang yang mikrohidro di wilayah yang ada *supply* airnya, tapi ada wilayah-wilayah yang memang juga tidak ada *supply* air, *intermittent* mataharinya juga terbatas, sehingga memang skema-skema, walaupun ini skema-skema tradisional ya, kita hari ini semangatnya EBT, tetapi untuk wilayah-wilayah yang memang sudah tidak memungkinkan lagi, ya kita hari ini bicara fakta, fakta di depan mata

hari ini yang tidak bisa kita pungkiri. Kalau kita bicara dalam kondisi ideal, suatu saat 2060 semuanya EBT, sudah nggak bakalan mungkin.

Jadi, saya kira mungkin, terutama dari punyanya wilayahnya Pak Adi ya, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, yang wilayahnya super rumit kayak gini, mungkin dibikin apa namanya, skenario tersendiri gitu. Di wilayah lain ini kita dari tadi baca, saya dengan Pak Rico ini sampai rasanya agak lucu gitu loh. Kok bisa sampai *oversupply* di mana-mana, sementara kita untuk penyediaan yang dasar saja nangis kita untuk minta dari PLN ini disediakan, gitu loh. Karena memang dia berbiaya tinggi untuk pembangunan di sana, sementara pembayaran dari masyarakat karena super miskin ini mungkin beda antara TDL yang ada di sana dengan BPP nya Pak Dirut.

Jadi wilayah-wilayah yang BPP nya 10 kali lipat dari yang TDL-nya dipisahkan Pak. Jadi kita *treatment*-nya itu masuk akal gitu loh. Jadi kalau mau dipaksakan pukul rata semua kayak begini, bakalan nggak mungkin. Jadi mungkin ini juga catatan kepada Bapak-Bapak yang di PLN semua, terutama Pak Adi, baru ini. Saya padahal baru mau menyurat kemarin, tapi sudah kadung ketemu hari ini Pak, salam jumpa untuk jabatan yang baru Pak.

**KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-P.NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Oke, iya.

**F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):**

Saya kira mungkin itu Pak Dirut, kita tunggu apa namanya, skema-skema seperti itu keluar.

**KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-P.NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Gebrakan-gebrakan.

**F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):**

Iya secara lebih luarbiasa lah, terima kasih.

**KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-P.NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Iya, dilanjutkan ini Pak, apa, Bang Zul dari Demokrat.

**F-PD (ZULFIKAR HAMONANGAN, S.H.):**

Iya, terima kasih Pimpinan.

**KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-P.NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Ini nanti juga masih ada, nanti dilanjutkan dari PKS.

**F-PD (ZULFIKAR HAMONANGAN, S.H.):**

Iya, terima kasih Pimpinan waktu dan kesempatannya.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Mohon izin, saya memperkenalkan diri saya kembali kepada Pak Darmo, mungkin setelah jadi dirut udah mulai lupa, waktu semasa menjadi wakil. Jadi saya memperkenalkan diri saya. Saya Bang Zulfikar, Fraksi Demokrat. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, baik terkait dapil, juga terkait persoalan di wilayah Banten yang berhubungan dengan PLN.

Yang pertama, mohon izin Pak Darmo. Saya sempat *whatsapp* Bapak, namun Bapak tidak balas. Sebetulnya saya tidak ingin menyampaikan ini di RDP, tapi saya lebih baik sampaikan ini secara langsung, karena mungkin Bapak lupa dengan masa nostalgila kita di Swiss ya.

Jadi, yang pertama yang ingin saya sampaikan ini terkait masalah gardu PLN yang ada di dapil wilayah saya. Ada 28 gardu PLN, di mana masyarakat di Dapil wilayah saya itu mendatangi saya, karena saya memang tinggalnya di dapil wilayah, lalu mereka ada membentuk semacam komunitas yang berhubungan terkait aspirasi warga, di mana gardu tersebut berada di tanah lahan warga masyarakat. Diberikan kompensasinya pada saat itu oleh PLN dalam bentuk listrik gratis kepada pemilik tanah tersebut. Namun, setelah berjalan hampir sekian tahun sampai sekarang, mereka menjadi bulan-bulanan aparat hukum, sehingga mereka seringkali dipanggil-panggil oleh pihak Polsek terkait masalah penggunaan listrik mereka yang tidak menggunakan meteran. Sedangkan mereka itu dulu kompensasinya adalah gardu itu dipasang *di situ*, tetapi diberikan listrik gratis kepada pemilik tanah tersebut. Tanahnya belum dibayar, tetapi listriknya sekarang menjadi bulan-bulanan dengan aparat hukum.

Nah, ini mereka memberikan berkas dokumennya kepada saya semua. Mohon izin Pimpinan, kira-kira siapa dari Dirut PLN yang punya tanggung jawab terkait hal ini, saya butuh mungkin ada PIC dari PLN yang bisa menjembatani persoalan ini di dapil wilayah saya. Karena jumlah gardunya cukup banyak, ada 28 titik gardu PLN yang ada di wilayah Kota Tangerang dan wilayah Kabupaten Tangerang. Itu yang pertama.

Yang kedua, di dapil wilayah saya, mungkin juga terjadi di wilayah lain, terkait yang berhubungan *voucher* listrik yang dibelanjakan di Indomart dan Alfamart. Ini banyak sekali masyarakat mengeluh tentang terjadi selisih antara jumlah apa, biaya pembelian voucher dengan selisih daya listriknya. Entah itu apakah itu keuntungan Alfamart dan Indomaret yang dimakan dari sisi pembayaran *voucher* itu, ataukah memang ada pengurangan jumlah kWh atau

apa yang akhirnya mereka kalau bayar misalkan contoh 100.000, itu *voucher*-nya mereka cuma 80.000 atau 90.000. Jadi beda sekali mereka rasakan seperti pulsa *handphone*. Kalau pulsa kan dia beli pulsa 90.000, ya pasti dia dapat paket 90.000, hanya harganya yang dinaikkan dari harga paket pulsanya. Kalau ini nggak, dia beli misalkan *voucher* listrik itu Rp80.000,- atau 70.000 tapi isi listriknya nggak nyampe 80.000 yang mereka dapat.

Nah, ini mungkin jadi catatan bagi dirut yang baru untuk menyelesaikan problem masyarakat. Saya rasa ini hampir di seluruh republik kita mengalami hal yang sama kalau bicara masalah *voucher*, kalau memang banyak keluhan masyarakat seperti itu.

Nah yang ketiga, saya ada rapat kerja di dapil wilayah saya juga dengan Apindo, Asosiasi Pengusaha Nasional yang ada di wilayah Provinsi Banten. Banyak sekali perusahaan-perusahaan industri di wilayah Banten mengeluh, entah ini memang program dari pusat atau memang permainan daripada GM-GM area yang ada di wilayah. Seringkali mereka melakukan teror terhadap perusahaan-perusahaan terkait masalah kelebihan kWh meter. Mereka mengatakan bahwa, listrik yang dipakai itu kelebihan kWh, sedangkan menurut Asosiasi Pengusaha atau Apindo juga pengusaha yang ketemu saya di Banten, yang pasang alat itu PLN.

Mereka gardu yang pasang PLN, alat juga yang pasang PLN, tapi setelah dipasang lalatnya, itu tiba-tiba setelah sekian tahun mereka dikatakan mengalami *trouble* terkait meteran, sehingga harus membayar ke PLN dengan nilai yang nggak tanggung-tanggung. Ada yang 350 juta harus bayar, ada bayar 500 juta. Ini juga perlu dikoreksi. Artinya, jangan sampai ini hanya sebuah oknum, atau ini memang betul-betul ada program dari PLN yang hal-hal tersebut maaf, bisa dinegosiasikan Pimpinan, bisa negosiasikan. Artinya kalau memang tidak sanggup bayar 350, ya sudah kita ngopi-ngopi 100 juga bisa. Artinya ini betul-betul persoalan kelebihan kWh atau urusan *cawe-cawe*? Kan begitu.

Nah, ini yang juga perlu disikapi, terutama masalah keluhan di Provinsi Banten mungkin perlu dievaluasi itu jajaran GM yang ada di area Banten, Provinsi Banten, Pimpinan. Karena ini banyak sekali berita-berita beredar yang miring ini tentang masalah di Banten tentang hal ini.

Nah, lalu yang berikutnya, tadi saya menyikapi tentang masalah *oversupply*. Saya sampai hari ini terheran-heran kepada PLN, selalu beritanya tentang *oversupply* yang mau dilarikan kepada kompor untuk penggunaan kompor listrik dan sebagainya. Sementara, sosialisasi terhadap pengusaha industri, baik itu Industri Kecil Menengah (IKM) dan apa, UMKM dan usaha kecil dan menengah, juga perusahaan-perusahaan industri besar, mereka itu tidak tersosialisasi tentang masalah program diskon penggunaan listrik di malam hari. Jadi penggunaan listrik di malam hari untuk perusahaan industri informasinya betul katanya ada diskon, ada juga yang mengatakan itu nggak benar.

Nah, ini perlu saya rasa edaran, surat edaran yang jelas kepada perusahaan-perusahaan industri tentang penggunaan listrik tersebut Pak Dirut. Jangan sampai hanya menggunakan medsos-medsos saja, media sosial, tapi tidak ada surat edaran yang resmi datang dari PLN kepada perusahaan-perusahaan industri tentang penggunaan listrik malam hari. Apakah betul penggunaan listrik malam hari itu gratis? Eh *sorry* diskonnya ada 30% penggunaan listrik malam hari.

Lalu yang kedua, kalau untuk menghabiskan itu Indonesia itu kan biasanya kita tim ahli menghabiskan, artinya yang namanya *oversupply* listrik, kalau Pak Dirut memiliki Dirut Pengembangan Bisnis, tentu target dia bagaimana menghabiskan *oversupply*. Yang saya nggak paham sampai hari ini, apakah PLN memiliki Direktur Pengembangan Bisnis yang targetnya menghabiskan *oversupply*, kan begitu. Kalau tidak ada, ya angkat saya aja Pak Dirut, iya, saya siap untuk bagaimana menghabiskan *oversupply* itu, karena persoalan menghabiskan itu, hal yang mudah bagi saya. Komisi VII siap semua tuh untuk menjadi Direktur Pengembangan Bisnis.

Jadi artinya, banyak sekali hal yang bisa dikerjasamakan. Contohnya kandang ayam. Kandang ayam sekarang kan sudah menggunakan teknologi listrik. Ayam zaman dulu sama ayam zaman sekarang sudah beda. Ada ayam kampus, iya nggak? Ada ayam sekolah, macam-macam ayam iya nggak? Jadi apa namanya, ayam zaman sekarang butuh listrik. Nah, jadi artinya kalau seandainya ada program kerja sama, diskon kepada kandang ayam, itu salah satu solusi. Jadi semua kandang-kandang ayam itu nggak kesulitan dia menggunakan listrik.

Nah, jadi bukan hanya harus kompor saja. Tapi wacana kompor ini sosialisasinya penting juga. Kalau saya agak beda pandang tadi dengan Pimpinan. Saya, khususnya Fraksi Demokrat, belum pernah ada program yang betul-betul dari PLN yang menyentuh ke masyarakat yang bisa kami hadirkan. Kami di tengah-tengah masyarakat, Anggota DPR RI bermitra dengan PLN hanya mendapatkan hujatan terus dari masyarakat. Kita tidak pernah bisa memberikan kebahagiaan untuk masyarakat.

Saya minta kepada Pak Dirut, berikan kompor listrik itu kepada Anggota DPR RI Komisi VII, agar kami bagikan kepada masyarakat menjelang lebaran ini. Nah, seperti itu. Tolong ini bisa dibuktikan oleh Pak Dirut kepada kami Anggota DPR RI Komisi VII, karena kami ini menunggu itu kompor listrik dibagikan kepada Anggota DPR RI Komisi VII, agar kami bisa memberikan kebahagiaan untuk masyarakat. Jangan cerita yang berat-berat terus yang kami terima, sementara kami tidak pernah mendapatkan program apa yang bisa dirasakan masyarakat melalui PLN. Tolong bagikan kompor listrik gratis kepada kami sebelum lebaran nanti kalau bisa ya Pak Dirut, itu dipikirkan. Pak Dirut itu harus memberikan kebahagiaan kepada kami di saat-saat Pak Dirut juga mengalami kebahagiaan, iya. Karena Pak Dirut kan baru diangkat kan? Doa-doa Komisi VII juga mempertahankan Bapak bisa bertahan atau tidak.

Baik, yang selanjutnya terkait masalah ini, kita sering datang keluar negeri melihat keindahan kota-kota di luar negeri. Tentu, Pak Dirut juga sama

sama dengan kami, berangkat kadang kita keluar negeri. Ini kan rapat tertutup ya, nggak ada salahnya kita curhat terkait masalah kenangan-kenangan manis kita di Swiss Pak Dirut ya. Yang jadi persoalan sama saya, Pak Dirut ini bisa nggak menyelesaikan masalah jemuran-jemuran baju yang ada di pinggir jalan? Jadi kabel-kabel listrik yang ada di pinggir jalan ini sudah seperti jemuran baju. Ada yang jaraknya 2 meter dari jalan, ada yang turun sampai 1 meter. Semrawut, jelek kita melihatnya itu Pak Dirut.

Coba program kerja apa yang Pak Dirut pikirkan ke depan untuk bagaimana mata masyarakat itu sudah tidak jelek melihat kabel-kabel listrik yang bergentayangan di pinggir-pinggir jalan ini. Nah, ini menjadi salah satu, bagaimana kita mengajak masyarakat, apa, turis asing datang ke Indonesia? Kalau, pariwisata kita ajak ke Indonesia, kalau dia pegang, dia kira gantungan baju padahal setrum. Itu bisa mati dia di situ, ya kan? Nah ini kan kacau itu Pak Dirut.

Jadi mohon ini menjadi sebuah pertimbangan dari Pak Dirut agar apa, persoalan-persoalan yang saya sampaikan tadi dapat diselesaikan dengan baik.

Mahal harganya si batu bacan,  
Bacan dibeli hijau warnanya,  
Salam penutup aku ucapkan,  
Cukup sekian aku ucapkan untuk dirut kita yang terkasih,

Terima kasih, Pimpinan.

**KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-P.NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Iya, cantik ya. Dilanjutkan PKS, nanti kembali ke Demokrat. Jadi biar rata dulu.

Dipersilakan yang terhormat, Ibu Diah.

**F-PKS (Dipl. Ing. Hj. DIAH NURWITASARI, M.I.Pol.):**

Terima kasih, Pimpinan.

*Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,*

Yang saya hormati Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi VII,  
Pak Dirut PLN beserta seluruh jajaran,

Saya nyambung sedikit yang di sampaikan oleh Pak Zul barusan. Memang betul Pak, terkait kabel itu. Kadang kita melihat pemandangan yang indah, tapi begitu mau difoto, itu pasti menghalangi pemandangan itu kabel listrik. Sudah gunung, sawah, bagus-bagus, mau di foto, cari *spot* yang nggak ada kabel listriknya itu jadi susah itu, iya.

Tapi ini, yang pertama Pak Ketua, saya kira ini bagian dari tugas kita di DPR RI ya. Artinya, kalau tadi membahas masalah Permen 26 Tahun 2021, ini sebagai sebuah contoh saja, bahwa sebuah kebijakan itu memang harus sangat cermat dan komprehensif dibuat gitu ya. Jangan sampai satu kebijakan itu hanya menyelesaikan satu persoalan, tetapi ketika dia tidak dilakukan secara komprehensif, ternyata dia berdampak kepada persoalan-persoalan yang lain.

Nah, ini yang saya lihat dalam berbagai macam persoalan itu karena kebijakan itu tidak komprehensif secara sektoral, dan terlebih lagi dengan kondisi Indonesia yang sangat luas dan beragam kondisinya. Barat, Timur, Jawa, non-Jawa, dan seterusnya seperti itu dengan kondisi yang sangat berbeda. Jadi untuk beberapa kebijakan mungkin ada yang sifatnya harus *tellered*, gitu ya. Jadi untuk kawasan tertentu seperti apa kebijakannya, kawasan yang lain seperti apa.

Tadi juga sudah banyak disampaikan ya oleh Bu Mercy, Pak Bambang, Pak Ramson dan lain-lain. Betul ini antara *oversupply* dengan di sisi lain kestabilan pasokan. Ini PR besar, dan harusnya di era teknologi seperti sekarang ada upaya yang serius dengan, atau memanfaatkan kemajuan teknologi. Bagaimana menyeimbangkan tadi apa, bukan menyeimbangkan, artinya mengatasi kedua hal ini secara bersamaan gitu ya. Menutupi kekurangan dengan menyalurkan persoalan yang *oversupply* tadi. Meskipun tadi dijelaskan ini dampak dari kebijakan di masa lalu dan lain-lain gitu ya tentang pembangunan pembangkit listrik dan seterusnya, tapi saya pikir dengan kemajuan teknologi hari ini, harus terus-menerus dilakukan upaya untuk melakukan keseimbangan tadi.

Saya hanya menambahkan mungkin dari daerah pemilihan saya. Yang pertama, saya ucapkan terimakasih Pak Dirut dengan Pak Hariyanto, dengan jajarannya, sesudah saya sampaikan kasus waktu itu tentang jembatan yang di Saguling ya, Indonesia Power, cepat segera ditanggapi, dan terjadi Pak Dirut apa yang jadi kekhawatiran saya. Jembatan itu akhirnya ambles, seambles-amblesnya, hanyut, rusak berat, terbawa oleh arus sungai Citarum. Karena dulu kan, dulu itu baru karena naik airnya lalu ada yang patah itu di bangunan jembatan ketika saya peringatkan itu. Dan katanya sudah diperbaiki, saya sebenarnya agak ragu, cuma tidak mau memperpanjang masalah saja gitu. Ternyata berapa hari yang lalu akhirnya jembatan itu tidak kuat menahan arus Citarum dengan eceng gondoknya, gitu. Akhirnya jembatan itu kebawa arus gitu ya, tidak bisa dipergunakan lagi gitu saat ini, dan artinya, tapi saya sudah berkomunikasi dengan GM Indonesia Power di Saguling, ya mudah-mudahan nanti bisa ada solusi ke depan.

Yang kedua Pak Dirut, saya juga beberapa waktu yang lalu sudah menyampaikan laporan via WA, pada Pak Haryanto juga gitu antara lain. Ini saya bukan dari Dapil saya langsung Pak Ketua, tapi dari Kabupaten Bekasi terkait dengan pembangunan sutet. Pembangunan sutet yang melalui desa Setia Mulya Kecamatan Tarumajaya, Bekasi. Di mana masyarakat di sana tiba-tiba dikejutkan dengan aktivitas pembangunan yang mereka tidak tahu menahu, setelah itu baru diketahui ternyata aktivitas pembangunan itu adalah

pembangunan sutet yang katanya pihak pembangun ini sudah mendapatkan izin sejak tahun 2018, tapi tidak pernah ada sebuah sosialisasi dan kemudian terjadi pergeseran titik dari yang awal tahun 2018 sampai dengan sekarang.

Kemarin saya sampaikan filenya, mungkin nanti ini juga, nanti akan saya sampaikan ke Pak Dirut juga gitu ya. Artinya, masuk, karena mereka sudah mengirimkan surat sampai dengan ke Ombudsman, dan setahu saya pada hari Senin lalu tanggal 14 Maret, Ombudsman di Jakarta ini sudah memberikan waktu untuk menerima aduan mereka terkait dengan pembangunan sutet ini. Karena masyarakat di sana betul-betul, ya tidak di apa namanya, ya tahu-tahu kaget aja gitu daerah mereka, dan itu daerah kawasan padat penduduk, yang tiba-tiba dilewati oleh jaringan sutet.

Itu saja Pimpinan, terima kasih.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-P.NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):**

*Wa'alaikumussalam warrahmatullahi wabarakatuh.*

Pak Dirut, salah satunya soal Sutet (Saluran Utama Tegangan Tinggi) ya, tegangan ekstra tinggi bahkan, tegangan udara ekstra tinggi. Sutet (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi) iya Sutet.

Dipersilakan Pak, saya kok lupa namanya lagi.

**F-PD (DRS. HENDRIK H. SITOMPUL, M.M.):**

Hendrik Sitompul.

**KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-P.NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Pak Hendrik Sitompul.

**F-PD (DRS. HENDRIK H. SITOMPUL, M.M.):**

Iya.

**KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-P.NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Dipersilakan Pak Hendrik.

**F-PD (DRS. HENDRIK H. SITOMPUL, M.M.):**

Terima kasih Pimpinan.

Selamat malam,  
Salam sejahtera buat kita semua, buat Pimpinan dan Anggota Dewan Komisi VII yang terhormat, serta  
Dirut PLN beserta jajaran yang kami hormati,

Saya hanya menyampaikan terkait dengan dapil saya saja Pak Dirut. Pertama, saya ikut dulu Sutet dulu. Apa, saya mempertanyakan terkait dengan pembangunan Sutet. Apa benar ini masyarakat nih Pak, apa benar pohon-pohon yang ditebang terkait itu tidak dibayar lagi? Pohon-pohon itu. Karena masyarakat mengeluh, katanya pohon-pohon yang kena terkait dengan jaringan-jaringan PLN dan Sutet itu tidak dibayar lagi sama PLN. Itu yang jadi perdebatan di dapil saya Pak, itu.

Berikutnya, terkait *oversupply* ya. Saya berharap di dapil saya itu, Medan, Deli Serdang, Sergi Tebing Pak. Jadi masih ada juga daerah di sana yang belum ada apa namanya, belum cerahlah, artinya PLN belum masuk Pak, iya masih ada. Jadi dengan *oversupply* ini saya kira salah satunya penugasannya untuk bersinarnya di daerah kami itu tolong menjadi perhatian Pak Dirut ya. Di daerah Deli Serdang sama Sergi itu masih ada Pak, iya.

Berikutnya juga, kami mohon tadi saya nggak melihat Pak Dirut, data pelanggan yang rumah tangga sama industri. Saya tidak melihat itu, tapi boleh nanti disampaikan. Karena kita mau melihat juga kebutuhan industri sama rumah tangga itu bagaimana perbandingannya? Nah, kalau saya lihat di Medan sendiri, kelihatannya untuk penggunaan PLN di industri di Sumatera Utara itu kelihatan masih kurang, Pak. Saya *ndak* tahu apa, bagaimana strategi PLN karena *oversupply*-nya tida di *supply* dengan maksimal, atau memang itulah kebutuhannya. Nah, ini juga saya pengen dengar juga. Karena pasti GM-GM setempat pasti akan memikirkan itu gituloh. Karena di industri di Medan itu banyak juga menggunakan tenaga sendiri, tenaga listrik sendiri itu Pak Dirut. Jadi dengan *oversupply* ini saya kira kan bisa di-*supply*.

Dan juga ada daerah-daerah tertentu juga memang listriknya dikuasai oleh swasta sendiri itu Pak, ada di Sumatera Utara ada begitu, Pak. Jadi saya kira dengan *oversupply* ini bisalah. Mungkin masyarakat mungkin dari harga, harganya kan bisa berkurang kalau PLN yang memasoknya, seperti itu, daripada swasta yang men-*supply*.

Terakhir, di Sumatera Utara juga ada ya pembangkit EBT yang kelihatannya mangkrak Pak. Saya tidak tahu sampai berapa lama PLN menghapus data ini Pak, data pembangkit ini, karena mereka tidak aktif lagi kan. Apakah terus-menerus data ini masuk di PLN? Sampai kapan gituloh? Nah, itu perlu tahu juga, karena mereka tidak operasi lagi, tidak kerja lagi kan. Sampai kapan, kenapa nggak dibiarkan, tetap masuk data ke PLN.

Itu saja kira-kira Pimpinan, terima kasih.

**KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-P.NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Iya, terima kasih Pak aduh siapa.

**F-PD (DRS. HENDRIK H. SITOMPUL, M.M.):**

Hendrik.

**KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-P.NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Pak Hendrik. Nama hebat kok saya suka.

**F-PD (DRS. HENDRIK H. SITOMPUL, M.M.):**

Hendrik Sitompul, Pak.

**KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-P.NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Hendrik Sitompul.

Jadi terima kasih Pak Hendrik Sitompul dengan berbagai catatan-catatan bagi PLN.

Saya minta kesepakatan. Ini sudah masuk jam 7, saya kira kita persilakan Pak Dirut dan jajarannya menjawab hal-hal yang sifatnya umum. Tapi pertanyaan dari Pak Ramson tadi menjadi penting. Coba jelaskan kerugian macam apa yang akan dialami PLN kalau tidak ada DMO, dan orang sebut sekarang namanya apa *price* apa, *market obligation*, atau PMO, yang intinya kita *kept*-lah di harga itu. Dan yang lain nanti dijawab secara tertulis, karena Bapak/Ibu sekalian, nanti akan diagendakan secepat mungkin, akan ada FGD PLN dengan kita. Jadi di forum itu akan kita pertajam yang menjadi catatan-catatan tadi yang. Sekali lagi ini waktu sudah pukul 19.00 WIB, saya kira kita juga sudah melanggar ini sudah lebih dari 2 jam di satu ruangan, tapi oke.

Dipersilakan yang terhormat Pak Dirut PLN.

**F-PDIP (Dr. Ir. WILLY MIDEL YOSEPH, M.M.):**

Pimpinan, satu menit saja Pimpinan.

**KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-P.NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Oh, siapa nih? Pak, oh, Pak Willy?

**F-PDIP (Dr. Ir. WILLY MIDEL YOSEPH, M.M.):**

Iya.

**KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-P.NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Pak Willy mohon maaf, sekaligus saya mengucapkan turut berbelas sungkawa yang mendalam atas wafatnya Ibunda tercinta ya. Yang terbaik, saya mohon maaf baru baca lihat tadi ternyata di WA grup kita ada, ya sekali lagi Pak Willy.

Dipersilakan, mohon singkat Pak Willy ya, waktunya juga juga sudah agak berat nih.

**F-PDIP (Dr. Ir. WILLY MIDEL YOSEPH, M.M.):**

Saya singkat saja, langsung kalau masalah nasional, saya pikir sudah banyak teman-teman yang bicara. Izin Pak Ketua dan seluruh anggota, langsung saja ke Pak Dirut dan seluruh jajarannya.

Saya Willy Yoseph, Dapil Kalimantan Tengah ya, Fraksi PDI Perjuangan. Saya pernah bersurat ingin melakukan audiensi dengan Dirut PLN ya untuk secara khusus meminta waktu. Bahkan saya baru dapat informasi dari teman kami, ada Pak Mukhtarudin, kemudian ada Iwan Kurniawan. Kami ada 3 orang Pak Dirut di Komisi VII dari daerah pemilihan Kalteng. Nah, kebetulan mungkin ditaruh di situ karena memang Kalteng saat ini merupakan, PLN nya sangat minim di desa-desa gitu ya, di desa-desa. Jadi kita lebih dari 400 desa yang ...*(suara tidak jelas)*... (02:17:38) nggak ada PLN nya.

Maka untuk itu, kami minta waktu Pak Dirut menyiapkan waktu kalau bisa secepatnya ya, untuk kita bersama-sama duduk membahas. Tentu juga melibatkan Dirjen Listrik Pak Dirut. ...*(suara tidak jelas)*... (02:17:57) kita bisa tuntaskan, karena saya rasa untuk menuntaskan Kalteng itu memang harus ada penugasan ya, karena waktunya ...*(suara tidak jelas)*... (02:18:03), tapi itu Indonesia gitu ya.

Maka untuk itu sekali lagi, karena ini tadi sudah dihubungi sama Pak Mukhtarudin, Pak Maman, kami ingin disatukan Kalteng dan Kalbar, kita khusus duduk membahas tentang listrik desa yang ada di Kalteng itu sangat minim, tapi ....*(suara tidak jelas)*... (02:18:23), makanya Kalteng itu kurang berbahagia gitu. Sementara, kita pembangkitnya *oversupply* gitu, pembangkit *oversupply*, tapi banyak desa yang belum ada listriknya. Maka untuk itu sekali lagi kami minta waktu, kapan saja Pak Dirut bisa ...*(suara tidak jelas)*... (02:18:42) kami, 3 orang dari Komisi VII ini, kita ingin membahas...*(suara tidak jelas)*... (02:18:47) tentang listrik desa di Kalteng dan di Kalimantan Barat tentunya. Dan nantinya hasilnya ini kita akan langsung bicara dengan Pak Gubernur dan para Bupati di Kalimantan Tengah.

Terima kasih Pak Dirut, ...*(suara tidak jelas)*...(02:19:00) Pimpinan.

**KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-P.NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Iya Pak Willy, terima kasih.

Intinya adalah listrik desa ini. Di Kalimantan ada beliau ini dari Dapil Kalimantan Tengah, ada juga Pak Maman tadi disebut-sebut, itu berarti Kalimantan Barat, dan juga Pak Awang Faroek itu adalah Kalimantan Timur, dan Kaltara itu adalah dapilnya Pak Arkananta. Jadi Kalimantan digaris bawah Pak Dirut dan juga segenap jajarannya, nampaknya elektrifikasi memang agak berat, karena memang mungkin infrastruktur, karena memang daerah apa, banyak sekali luas-luas wilayah.

Ya, dilanjutkan Pak Dirut, dipersilakan sekali lagi dijawab hal-hal yang memang secara bersama tadi menjadi perhatian semuanya, dan nanti sekali lagi dijawab secara tertulis yang akan kita pertajam nanti di FGD.

Dipersilakan Pak Dirut.

**DIREKTUR UTAMA PT. PLN PERSERO (DARMAWAN PRASODJO):**

Terima kasih.

*Bismillahirrahmanirrahim,  
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,  
Salam sejahtera untuk kita semua,  
Om swastiastu,  
Namo buddhaya,*

Terima kasih atas masukan dari Pimpinan dan para Anggota Komisi VII.

Untuk Bu Mercy Barends, memang izin Bu, skenario ini berbasis pada bagaimana kita melakukan *adjustment* pertumbuhan *demand*, dan kami mengakui bahwa di tahun 2014 estimasi proyeksi pertumbuhan *demand* itu berbasis pada dua. Satu adalah pertumbuhan ekonomi, yaitu pada waktu itu diprediksi 6,1% dan korelasi antara pertumbuhan ekonomi dengan pertumbuhan listrik yang pada waktu itu 1,3 Bu. Di masa lalu itu korelasinya 2, dan pada waktu itu sudah diturunkan menjadi 1,3 dan dari hitung-hitungan itu muncullah 8 koma sekian persen pertumbuhan *demand* listrik.

Nah tetapi, di tahun 2015 ternyata ada pergeseran baik itu struktur ekonomi yang tadinya ekonomi berbasis pada industri, tetapi saat itu berbasis pada pariwisata dan juga banyak layanan yaitu juga ekonomi *e-commerce*. Sehingga yang tadinya energi intensif saat ini menjadi berkurang, dan juga ada *disruption of technology*. 2013 kalau kita beli lampu LED itu harganya 250.000 per bohlam, sehingga pada waktu itu masih lampu pijar, tapi saat ini 70.000, dapat 7 itu ekstranya 1 Bu, itu lampu LED 3 watt saja sudah terang. Nah, untuk itu terjadi pergeseran, dan kami mengakui untuk itulah bagaimana estimasi

pertumbuhan ekonomi, hubungannya dengan penambahan *demand* ini perlu kami kalibrasi dengan lebih baik lagi Bu, itu kami akui.

Untuk itu kami setuju Bu, mendukung *adjustment* tadi spesifik terhadap titik-titik pertumbuhan ekonomi dari region-region itu tersendiri bu. Kami sebagai contoh mengakui, misalnya pertumbuhan listrik terbesar di Indonesia itu antara Bakauheni, Terbanggi Besar, Kayu Agung, itu dengan adanya pembangunan jalan tol, sehingga terintegrasi tadinya daerah-daerah yang terisolasi, dari Kayu Agung itu ke Bakauheni, ke Jakarta itu bisa sampai 15 jam, saat ini hanya 4-5 jam. Sehingga disitu pelanggan-pelanggan kami tumbuh Bu. Kemudian juga ada perikanan, kemudian juga adanya smelter baru dengan nikel dan lain-lain.

Nah untuk itu kami tadi masukan dari Bu Mercy bahwa, ini perlu adanya *adjustment*. Ada yang memang estimasinya masih *overshoot*, masih terlalu tinggi, tetapi ada daerah-daerah yang estimasinya terlalu rendah, dan untuk itu perlu tadi *adjustment*, kami setuju Bu, dan kami akan melakukan *adjustment* itu dari region-region, sehingga yang mengalami *oversupply* bisa dikoreksi, tetapi yang mengalami defisit juga segera bisa kita selesaikan.

Tadi ada dari Pak Ramson Siagian bahwa,

**F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):**

Pak Dirut, mungkin sebelum berpindah, mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang *losses* teknis-nonteknis ini?

**DIREKTUR UTAMA PT. PLN PERSERO (DARMAWAN PRASODJO):**

Siap bu, untuk *losses* Bu,

**F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):**

Apa namanya, efisiensi di dalam. Kita ingin dapat kepastian saja. Karena kalau angkanya itu sampai sebesar yang dipaparkan Dirut kemarin 38 triliun, anggap saja subsidi yang kita kasih itu untuk selesaikan *inefficiency* di dalam PLN sendiri. Jadi mungkin ini saja, mungkin kita butuh penjelasan ini juga Pak Dirut.

**DIREKTUR UTAMA PT. PLN PERSERO (DARMAWAN PRASODJO):**

Iya Bu.

Mohon izin Bu, memang ada target *losses* yang dari Kementerian ESDM Bu, yang itu kami sudah memenuhi target tersebut Bu, kami *losses*-nya sudah di bawah itu, dan kami secara menyeluruh Bu, melakukan suatu *asesment* bagaimana agar *losses* ini bisa segera diturunkan. Kami mengakui bahwa *losses* PLN, terutama di daerah-daerah yang agak terpencil, di Sumatera, daerah-daerah terpencil, di mana kualitas transmisi distribusi kami di bawah

dari yang ada di Jawa, itu masih agak tinggi Bu. Kemudian kami juga melakukan *digitalisasi* yaitu menggunakan neraca *online*.

Dulu *losses* itu dihitung menggunakan manual Bu Mercy. Jadi kami, kalau kami boleh terbuka itu menggunakan *excel*, dan untuk *losses* bulan ini baru bisa dihitung finalisasi baru bulan depan, Bu. Sehingga dalam proses ini angka hanya menjadi angka. Nah, selama 2 tahun ini, kami membangun sistem digital namanya neraca *online*. Bagaimana *losses* dihitung? Itu dari pembangkit, begitu masuk ke transmisi tegangan tinggi kami hitung berapa, sampai ke transmisi ke tegangan menengah berapa, dihitung kekurangannya berapa. Kemudian dari menengah ke tegangan rendah sampai ke rumah-rumah, tentu saja ini ada jutaan titik.

Nah bagaimana strateginya adalah, bahwa dalam menghitung neraca ini bukan hanya angkanya, tetapi kami harus bisa melakukan *pin point*, di mana *losses* yang terbesar? Itu yang menjadi masalah, karena selama ini penghitungannya masih menggunakan warna. Untuk itu sudah selama 2 tahun ini kami membangun namanya digital neraca *online* secara digital, dan penghitungannya secara riil *time* Bu, dan dari riil *time* itu langsung bisa kita *pin point* dimana *losses* yang terbesar, dan ruasnya ada di mana, sehingga kami juga *pin point* berapa biaya untuk mengatasi *losses* ini.

Tentu saja *losses* ini bisa diatasi secara cepat, tetapi nanti kebutuhannya bisa ratusan triliun, Bu, karena ini adalah jaringan yang sudah dibangun puluhan tahun, kemudian belum ada bagaimana pemutakhiran dari jaringan yang sudah tua tersebut Bu. Ini sedang kami hitung, tetapi saat ini memang dari target yang dicanangkan oleh Kementerian ESDM kami sudah bisa melampaui target tersebut Bu, tetapi ini kita sedang berproses.

Selanjutnya untuk Pak Ramson Siagian bahwa, andaikan Komisi VII tidak memperjuangkan DMO 70 dolar berapa penambahannya? Nah, ini hitungannya sangat, sebenarnya sangat simpel sekali, bahwa kebutuhan PLN ini 130.000.000 US dolar eh 130.000.000 ton. Nah, tahun kemarin bahwa selisih harga antara ekspor dengan domestik rata-rata Pak Ramson, ini sahabat lama, kali kan 50 dolar Pak, jadi 50 kalikan 130.000.000 kira-kira 6,5 miliar US dolar, Pak. 6,5 kalikan, anggap saja 14.500 Pak, sekitar 91 triliun Pak, untuk selama setahun, tahun kemarin.

Nah tahun ini Pak, izin Pak, ini selisihnya menjadi sekitar 177 kira kurang 4, sekitar USD 130 selisihnya saja Pak, untuk kalori 4.500, karena harga di luar saat ini sudah mencapai 330 Pak. Jadi 130 dikali 170 kurangi 46, sekitar 120 Pak. USD 15 billion Pak kalikan 14.500 jadi sekitar 226 triliun Pak penambahan *cost* Pak kalau tidak itu.

Nah dari sana memang kami mengakui,

**F-P.GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):**

Izin Pak Ketua.

Jadi, untung juga diperjuangkan Komisi VII habis-habisan soal apa, DMO *price*. Kalau tadinya hanya *volume* Pak Dirut.

**DIREKTUR UTAMA PT. PLN PERSERO (DARMAWAN PRASODJO):**

Siap Bapak.

**F-P.GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):**

Kita *fight* untuk *price* USD 70.

Terima kasih Pak Dirut, terima kasih Pak Ketua.

**DIREKTUR UTAMA PT. PLN PERSERO (DARMAWAN PRASODJO):**

Nah kami mohon izin elaborasi Bapak, bahwa di tahun 2017-2018 kami melakukan survei, berapa *cost of good soil* dari batubara, Pak. Jadi kami melakukan survei itu dengan catatan melakukan observasi. Pada saat harga batubara turun, itu berapa, kapan perusahaan batubara mulai menghentikan operasi? dan harganya pada waktu itu sekitar 53 dolar per ton, Pak. Tetapi tentu saja dengan kenaikan harga internasional seperti ini *cost* dari operasi batubara bisa naik, mungkin sekitar 60-65 biaya untuk *extraction cost*-nya, sehingga di sini tentu saja ada *windfall profit*. Nah dari *windfall profit* tadi, selisih dari 70 dengan itu kami sudah menghitung, bahwa sekitar 50 sekian persen itu untuk PPN dengan PPH yang masuk ke pemerintah, sehingga 40 sekian persennya masuk ke pengusaha.

Jadi artinya memang, kalau 70 dolar ini dilepas, akan ada kenaikan biaya sebesar, tahun ini sekitar 226 triliun, di mana 55% atau 58% nya dari 226 triliun ini menjadi penambahan pendapatan untuk negara, 40 sekian persennya adalah menjadi *windfall profit* dari sektor batubara, yang ini nanti akan di-pass *through* baik itu melalui subsidi maupun kompensasi ke masyarakat.

Kemudian juga untuk Pak Bambang Patijaya, terima kasih ini atas masukannya. Kami segera di sini ada Pak Wiluyo, Direktur Mega Project nanti yang akan segera mengakselerasi Pak. Kemudian juga ada Pak Adi Lumakso disini mengakselerasi bagaimana untuk proyek kabel laut dari Sumatera-Bangka, kemudian juga untuk yang Belitung kami mengakui Pak untuk riset margin, Pak. Untuk sistem interkoneksi yang besar seperti Jawa dengan Sumatera, itu riset margin 25%-30% sudah cukup Pak, sudah berlebih, tetapi untuk sistem kecil memang diperlukan riset margin yang lebih besar, karena begitu ada industri yang masuk lonjakannya juga bisa cukup besar Pak. Ini menjadi perhatian kami, tetapi untuk yang G20 kami sudah hitung semuanya Pak, *insya Allah* aman pasokannya.

Kemudian dari Pak Ramson tadi juga sudah. Masuk Pak Zulfikar. Kami kalau teringat Bapak kami tersenyum terus Pak, di mana kita nge-vlog bersama-sama begitu ya Pak, kita makan di puncaknya sana ada kejadian yang agak menghebohkan itu yang mungkin kita bahas di tempat lain begitu Pak. Iya Pak, mohon izin Pak nanti kami beri perhatian khusus.

Untuk itu Pak, kami siap berkolaborasi dengan Komisi VII, mengenai kompor listrik Pak ya, kemudian untuk keindahan kota juga kami dalam hal ini, untuk Direktur Regional semua ada disini Pak, dari Jawa-Madura-Bali Pak Haryanto, kemudian Pak Adi Lumakso disini untuk Sumatra-Kalimantan-Sulawesi-Maluku-Papua-Nusa Tenggara. Jadi untuk keindahan ini dipersilakan.

**F-PD (ZULFIKAR HAMONANGAN, S.H.):**

Izin Pak.

Di pusat kota Tangerang itu kabel listriknya sampai ke lantai Pak, sudah 1 meter dari jalan semua, melilit ke bawah di wilayah Kota Tangerang. Jadi luar biasa itu situasi kabel listriknya di kota Tangerang, *semrawut*.

**DIREKTUR UTAMA PT. PLN PERSERO (DARMAWAN PRASODJO):**

Siap pak, kami catat Pak. Ini Pak Haryanto, monggo Pak nanti dicek manager UP3 nya dikontak, kebetulan saya juga orang Banten Pak, tinggalnya di BSD, jadi ini satu wilayah di sana.

**ANGGOTA KOMISI VII:**

Interupsi, Pak Ketua.

**DIREKTUR UTAMA PLN (DARMAWAN PRASODJO):**

Tapi mohon izin ini kami Pak memberi.

**F-P.GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):**

Sebentar Pak, interupsi.

Tadikan hitung-hitungannya 200 sekian triliun, kalau pajaknya pemerintah itukan tidak semua dikirim ke PLN, terkecuali ada subsidi. Artinya, yang diperjuangkan Komisi VII itu sangat efektif. Kebetulan Komisi VII mau menghadapi hari raya lebaran, bagaimana caranya bisa seperti tadi membahagiakan konstituen di dapil. Apa yang bisa, ide-ide, saya pikir Pak Dirut, Pak Direktur sangat brilianlah untuk itu, bisa merasakan tanpa disentuh.

Terima kasih, Pak Ketua.

**KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-P.NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Siap.

**DIREKTUR UTAMA PT PLN PERSERO (DARMAWAN PRASODJO):**

Siap Pak Ketua, iya Pak. Itu pandangan hidup Pak, tanpa disentuh Pak, memandang juga hidup Pak.

Siap Pak Ramson, kami paham Pak, untuk itu.

Mohon izin itu Pak Zulfikar, memang di tiang listrik kami itu ada kabel-kabel dari pihak swasta untuk telekomunikasi Pak, dan biasanya begitu ada kabel-kabel yang *semrawut*, begitu kami cek ternyata itu milik mantan partner kami gitu Pak, yang dulu memang setiap tiang listrik itu di sewa oleh pihak ketiga untuk menjadi bagian TV maupun internet Pak. Dan untuk itu kami akan mengecek Pak di lapangan, kabel-kabelnya seperti apa, tetapi masukkan, biasanya, ini tadi Pak Haryanto juga memberi masukan Pak, itu kabelnya yang internet itu Pak dari pihak ketiga.

Begitu Pak.

**F-P.GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):**

Nggak juga Pak, karena memang saya tinggal di dapil situ sehari-hari ya muter-muter disitu kabel PLN. Jadi saya bisa membedakan kabel Telkom, kabel apa namanya, *handphone*, yang jaringan *handphone*, dengan kabel listrik. Jadi kabel listrik ini memang kabel listriknya yang melilit-lilit disitu Pak, karena sambungan ke rumah-rumah orang itu loh Pak, semuanya iya.

**DIREKTUR UTAMA PT. PLN PERSERO (DARMAWAN PRASODJO):**

Kita lihat lokasi Bapak, mohon izin pak nanti kami lihat lokasi, yang pada intinya kami siap pak untuk membersihkan kabel-kabel tersebut, Pak. Nanti kalau memang itu dari PLN segera kita bereskan gitu, Pak.

*Monggo.*

Nanti kalau Pak Zulfikar ada ini Pak, foto-fotonya Pak, itu dikirim ke kami kami, segera selesaikan itu. Ini perhatian khusus Pak, daripada nanti di-*vlog* lagi pak. Kami paham pak itu, kekuatan *vlogging*-nya Bapak.

Kemudian Ibu Diah. Ibu Diah, keluhan tentang jembatan di Saguling Bu, kami mohon maaf. Ini segera ditangani oleh Indonesia Power, ini langsung kami perintahkan Bu malam ini Bu agar segera diselesaikan.

Kemudian keluhan jalur Sutet di Bekasi, memang mohon bantuannya Bu ini untuk proyek dari jalur Tanjung Priok ke gardu Bekasi, tetapi mohon izin.

**F-PD (ZULFIKAR HAMONANGAN, S.H.):**

Pak Darmo yang saya belum tuntas dijawab itu, masalah yang gardu tadi yang masyarakat tanahnya dipakai.

**DIREKTUR UTAMA PT. PLN PERSERO (DARMAWAN PRASODJO):**

Oh ya pak, mohon izin Pak. Ini Gardu di wilayah Tangerang ini nanti Pak Haryanto dipersilahkan dari Direktur Jawa-Madura-Bali.

Kemudian juga Apindo nanti juga *monggo* nanti diselesaikan ya Pak Haryanto.

Kemudian untuk kompor listrik kami siap untuk berkolaborasi. Baru saja ini juga Direktur Niaga kami Pak Bob Saril sudah menjawab untuk.

**F-PD (ZULFIKAR HAMONANGAN, S.H.):**

Kompornya sudah ada Pak? Yang buat anggota.

**DIREKTUR UTAMA PT. PLN PERSERO (DARMAWAN PRASODJO):**

Direktur Niaga kami ini ada WA grup. Tadi kan pertanyaan kami catat semuanya dan jawabannya, "Pak Dirut saya siap, kami siap untuk bekerjasama dengan Komisi VII dalam rangka sosialisasi kompor listrik". Kemudian tadi juga untuk *voucher* listrik, itu memang ada pajak penerangan yang sudah dimasukkan ke sana, tetapi harga per kWh kami tetap sesuai dengan patokan pak, dan lain-lain.

**F-PD (ZULFIKAR HAMONANGAN, S.H.):**

Dikasih keterangan Pak di *struk* itu Pak. Ini yang jadi persoalan, nggak ada keterangan di *struk* itu, jadi akhirnya itu terus yang jadi komplainan. Khawatir nanti lama-lama memuncak Pak.

**DIREKTUR UTAMA PT. PLN PERSERO (DARMAWAN PRASODJO):**

Siap.

**F-PD (ZULFIKAR HAMONANGAN, S.H.):**

Namanya masyarakat terus-terusan memuncak. Jadi lebih baik di *struk*nya diberikan keterangan.

**DIREKTUR UTAMA PT. PLN PERSERO (DARMAWAN PRASODJO):**

Siap, siap, siap Pak.

Itu kami menjadi catatan ini. Kami disini, kami masukkan dalam suatu catatan yang menjadi tindak lanjut bagi direksi kami Pak yang di bawah.

Kemudian untuk Pak Hendrik Sitompul, ini izin Pak, ini pohon-pohon tidak dibayar lagi oleh PLN, ini *monggo* Pak Wil dijelaskan ini seperti apa, direktur mega *project*-nya membangun-bangun Sutet itu seperti apa.

*Monggo Pak.*

**DIREKSI PT. PLN PERSERO (WILUYO):**

Izin Pak Dirut, Pak Hendrik.

Jadi sesuai dengan Permen ESDM Nomor 13 Tahun 2021 Pasal 18 ayat (4), itu pohon-pohon yang ada di jalur Sutet itu diberikan biaya tebang Pak, sesuai ketentuan tersebut. Jadi kami memberikan kompensasi berupa pembayaran biaya tebang. Demikian Pak Hendrik.

Tetapi untuk jalur-jalur yang sudah selesai dibayarkan dan suatu saat dilakukan *reconductoring*, artinya kawatnya diganti baru Pak, itu tidak diberikan kompensasi lagi Pak atau biaya tebang. Ini karena sudah dilakukan pemberian biaya tebang supaya tidak dilakukan pembayaran dua kali pembayaran.

Demikian Pak Hendrik, terima kasih Pak.

**F-PD (DRS. HENDRIK H. SITOMPUL, M.M.):**

Pimpinan, sebentar.

Selain Sutet kan ada juga daerah tiang-tiang yang listrik Pak, yang listrik. Itu dibayar Pak?

**DIREKSI PT. PLN PERSERO (WILUYO):**

Kalau untuk yang 20 KV tidak Pak. Jadi 20 KV tidak ada aturan yang mewajibkan kita untuk membayar pohon-pohon atau tanaman yang di bawah 20 KV itu Pak.

Demikian Pak Hendrik.

**DIREKTUR UTAMA PT. PLN PERSERO (DARMAWAN PRASODJO):**

Mohon izin Pak Hendrik.

Memang pada waktu itu kami masih bertugas di pemerintahan, di, sebagai deputi. Pada waktu aturan itu digodok, memang dari pemerintah itu menghitung. Kalau pembayarannya itu pada waktu berkala, itu seperti apa? Memang ada tambahan biaya itu sampai bisa triliunan Pak. Karena jaraknya itu ada jutaan kilometer Pak. Kemudian di jutaan kilometer itu kalau ditanam misalnya pohon Singon, atau bambu, dan lain-lain itu pertumbuhannya cepat sekali Bapak. Sehingga kalau andaikan itu ada penggantian, begitu ada pemotongan, dihitung pohonnya nilainya berapa, memang nanti kali kan jalur sekian, kemudian berapa bulan sekali ada pemotongan dan sekalian itu. Nanti juga ada permasalahan moral *hazard* Pak. Begitu tahu begitu, ada aturan itu, nanam pohon yang paling cepat tumbuh di bawah transmisi, demikian Pak. Sehingga pada waktu itu dengan terpaksa pembayaran hanya sekali saja, itu

untuk tegangan tinggi, dan seterusnya PLN memang tidak punya ruang fiskal untuk melakukan pembayaran tersebut.

Demikian, Pak.

**F-PD (ZULFIKAR HAMONANGAN, S.H.):**

Izin Pak Darmo, ini mendalami sedikit masalah sutet Pimpinan.

Salah satu persoalan kemarin waktu audiensi dengan Apindo juga, ada beberapa perusahaan industri yang sutetnya itu berada di area pabrik, sementara itu menghantarkan petir terus di pabrik itu. Jadi apakah menurut mereka tiang tersebut bisa dipindahkan atau tidak? Karena pada saat pemasangan itu berdasarkan izin gubernur katanya, nah sementara perusahaan itu keberatan karena tiang Sutetnya berada di area pabrik tersebut. Nah mereka sudah mengadu, mengajukan gugatan hukum katanya ke pengadilan terkait masalah tiang itu. Apakah memungkinkan untuk dipindahkan?

**DIREKSI PT. PLN PERSERO (WILUYO):**

Izin Bang Zul, jadi biasanya kalau ada kejadian tersebut Pak, pengalaman kami itu Sutetnya berdiri dulu Pak, sehingga pada saat kami meminta izin dari provinsi atau dari gubernur, kami selalu mendapatkan izin Bang Zul, karena pada saat itu memang belum berdiri bangunan-bangunan industri Pak. Nah, kemudian ketika ada permintaan pemindahan, tentunya ini harus kami kaji Pak. Kalau itu pemindahannya tidak menabrak lokasi lain, artinya mendapatkan izin dari pemilik tanah, tentunya ini bisa dilakukan, tetapi kami juga perlu biaya yang cukup besar untuk memindahkan *tower* kami. Dan juga tentunya ada pemadaman Pak, karena *tower* itu harus kami lepas, kabel-kabelnya kami lepas, dan ini menimbulkan biaya yang cukup besar bagi kami Pak.

Demikian Pak Ketua.

**F-PD (ZULFIKAR HAMONANGAN, S.H.):**

Mohon maaf Pak, kembali lagi ke gubernur atau bisa langsung ke PLN?

**DIREKSI PT. PLN PERSERO (WILUYO):**

Ke gubernur Pak, jadi setiap *(suara tidak jelas...)*

**F-PD (ZULFIKAR HAMONANGAN, S.H.):**

Oh, berarti kembali ke gubernur lagi?

**DIREKSI PT. PLN PERSERO (WILUYO):**

Iya, setiap pemisahan lahan kami harus punya izin prinsip pembebasan tanah dari gubernur pak, sesuai aturan undang-undang mengenai pemisahan lahan Pak.

Terima kasih Pak.

**DIREKTUR UTAMA PLN (DARMAWAN PRASODJO):**

Mohon izin kami lanjut, Pak.

Terima kasih Pak Wiluyo atas Jawabannya.

Untuk Pak Rico Sia, tadi langsung, berkomunikasi langsung Pak dengan Pak Adi Lumakso. Pak Adi *monggo* ditindaklanjuti itu, eh Pak Adi Priyanto ini. Soalnya ada dua Adi pak, mohon izin Pak, ada dua Pak. Ini Pak Adi Priyanto lebih sepuh daripada Pak Adi Lumakso, sehingga disebut dengan Adi 1 Pak, Adi Lumakso Adi 2 Pak.

Nah untuk itu Pak, bagaimana tadi dari Pak Hendrik Sitompul mengenai data pelanggan rumah tangga dan produksi. Mohon izin Pak, memang kami harus mengakui Pak, misalnya dari Medan-Binjai Pak, itu ada jalan tol 17 km Pak. Dan di sana kami kaget juga bahwa, penambahan *demand* di kiri-kanan jalan tol, itu penambahan pelanggan baru yang 20 KV Pak, 20.000 volt, bukan 220. Artinya ini adalah penambahan berbasis pada pertumbuhan industri investasi baru di daerah tersebut.

Nah memang, di saat ini misalnya sedang dibangun tol dari Palembang ke Bengkulu, dari Palembang ke Jambi, Jambi ke Pekanbaru, Pekanbaru sampai ke Padang, Padang ke Medan, Medan sampai ke Aceh. Nah, tentu saja di situ pertumbuhan *demand* kami di Sumatera itu memang berbasis pada *exit* tol nya Pak. Begitu ada *exit* tol, kemudian ada industri baru terbangun di kiri-kanannya. Nah, ini menjadi pemantik pertumbuhan industri dari tadinya daerah-daerah yang terisolasi menjadi dana daerah yang ter ada koneksinya. Karena ini Trans Sumatera sebagai contoh dari PT Hutama Karya 2.800 km, itu jaraknya dari lintas Sumatera itu sekitar 40 sampai 70 kilo. Jadi bukan untuk mengurangi kemacetan, tetapi adalah untuk membuka daerah-daerah yang tadinya tidur atau terisolasi menjadi daerah yang terkoneksi.

Nah ini tadi, bagaimana komposisi kedepan? Kami melihat bahwa di Sumatera menjadi titik-titik pertumbuhan *demand* yang tertinggi yang ada di Indonesia. Salah satu yang lain adalah di tempatnya ini, di tempatnya Pak Adi Lumakso, satu lagi di tempatnya Pak Adi Priyanto adalah di Sulawesi untuk *smelter* Pak. Jadi pertumbuhan *demand* kami lebih spesifik. Tadi tempatnya Bu Mercy itu, begitu ada investasi untuk perikanan Bu, dengan adanya *cool storage*, kemudian investasi perikanan juga ada titik-titik pertumbuhan. Nah untuk itu, kami mengakui bahwa, perencanaan RUPTL kami perlu adanya suatu *adjustment*, yaitu bagaimana kita bisa memotret, bukan *backward looking*, tetapi *forward looking*-nya seperti apa?

Saat ini sedang ada lelang misalnya dari Palembang sampai ke Bengkulu. Kami sebenarnya sudah bisa melihat *exit* tolnya ada di mana saja? dan dari *exit* tol itu nanti kita bisa memprediksi seperti apa titik-titik pertumbuhan ekonomi baru. Pertanyaannya, apakah itu sudah ter-refleksi di RUPTL? Jawabannya belum Pak, karena ini kan ada suatu dinamika yang ada di lapangan. Nah untuk itulah kami mengakui, bahwa ini daerah-daerah yang menjadi ada pemantik pertumbuhan ekonomi baru, aktivitas baru, rakyat bisa menggunakan sumber daya alamnya dengan lebih baik lagi, itu kami perlu perkuat, sedangkan yang *oversupply* ini harus kita bisa menambahkan *demand*. Nah ini perlu adanya suatu *adjustment*.

Kemudian dari Pak Willy tadi listrik desa, kemudian Pak Maman juga Kalimantan Barat, kemudian juga di Kalimantan Utara ini menjadi perhatian kami juga, ini nanti Pak Adi Lumakso dipersilakan untuk mendapat perhatian khusus.

Untuk selanjutnya dengan pertanyaan-pertanyaan yang masih ada, kami siap untuk menjawab tertulis, kami detailkan, tetapi pada intinya kami mengucapkan terima kasih sekali atas arahan, bimbingan, dukungan, dari Komisi VII terhadap PLN. Semoga ini menjadi berkah bagi kita semuanya, tantangan yang luar biasa ini bisa kita ubah menjadi suatu *opportunity*, agar ke depan PLN lebih kokoh lagi.

Terima kasih, waktu dan tempat kami kembalikan ke Pak Ketua.

*Wabillahi taufik wal hidayah,  
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-P.NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):**

*Walaikumsalam warrahmatullahi wabarakatuh.*

**F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):**

Pak Ketua, Pak Ketua interupsi mungkin sebelum tutup, satu menit saja.

**KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-P.NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Iya, tapi waktu ya.

**F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):**

Iya, iya, baik.

Pak Dirut, informatoris saja, setahu kami bulan April 2022 waktu itu kan kita dengan Pak Ketua juga yang turun. Waktu itu NVPP Maluku selesai masa kontrak. Kan waktu itu kan sudah ada sejumlah skenario ya, 4 sampai 6

skenario, karena dia meng-cover kurang lebih 80% supaya listrik Kota Ambon. Mungkin informatoris saja, hari ini apa namanya, kebijakan skema yang ditempuh apakah perpanjang, ataukah dari jeranjang, dari Supa, atau sewa PLTD seperti yang kita bahas pada beberapa waktu yang lalu. Karena yang PLT MG yang 2 *fuel* itu kan cuma 30 iya, apa, megavolt ya. Mungkin ada yang bisa menjawab ini, karena ini sudah masuk April ini.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-P.NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Silakan.

**DIREKSI PT. PLN PERSERO :**

Baik, Bu Mercy terima kasih.

Memang pada akhir bulan nanti Bu, itu selesai Bu yang LMVPP yang awal, tetapi kami sudah mempersiapkan *branch mounted powerplant* yang dari, *branch mounted powerplant* yang kami pesan dari PT PAL, itu kan sudah jadi dan sudah bersandar di sana, Bu. Kami punya waktu sampai dengan akhir bulan untuk menyelesaikan GT-nya, dan kami yakin GT itu nanti selesai. Jadi LMVPP sebesar 60 megawatt, nanti bisa langsung *connect* ke *system* Ambon Bu. Namanya masih kita carikan yang terbaik ini Bu. Iya, betul.

**DIREKTUR UTAMA PT PLN PERSERO (DARMAWAN PRASODJO):**

Ibu, namanya mungkin janji putih Ibu.

**KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-P.NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Iya, jadi betul Bapak/Ibu sekalian, listrik adalah urat nadi. Sudah menjadi *basic need* ya, kebutuhan dasar manusia lah. Jadi seluruh kehidupan sekarang sudah sangat tergantung dengan listrik.

Jadi Pak Darmo dan segenap jajarannya, bahwa kehadiran Pak Darmo dan segenap jajarannya PLN ini betul-betul menjadi harapan semua orang, bagaimana PLN menunjukkan kinerjanya yang baik, mampu melayani dengan baik, dengan, sudah barang tentu harga, dan *sustainably* yang juga diharapkan demikian.

Jadi itu kurang lebih, bahwa masih ada kurang ini, kurang itu, nanti dijawab secara tertulis.

Sekali lagi Bapak/Ibu yang terhormat,

Kita akan dalam nanti dalam FGD yang *Insy Allah* secepat mungkin, minggu depan kita akan FGD.

Baiklah Bapak/Ibu sekalian,

Mari kita, meskipun ini rapat tertutup, ini ada kesimpulan rapat, kita cermati, dalam,

Draf kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan Dirut PT PLN,  
Senin, 21 Maret 2022,

1. Komisi VII DPR RI mendorong Dirut PT PLN untuk melakukan negosiasi kepada IPP terkait waktu atau COD dan tingkat utilitas guna menjaga kondisi keuangan perseroan.

Saya kira ini normatif, tetapi juga ini menjadi catatan kita memang. Ada keberanian dari PLN untuk semaksimal melakukan renegotiasi. Saya kira kalau kita cerita banyak sekali lagi Pak Ramson dan Bapak/Ibu sekalian, forum ini juga pernah menolong sekitar 6 triliun PLN, kita membatalkan naiknya 2 giga batang. Betul? Dan itu *take or pay* 85% betul?

**DIREKTUR UTAMA PT PLN PERSERO (DARMAWAN PRASODJO):**

Mohon izin Pak.

**KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-P.NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Iya.

**DIREKTUR UTAMA PT PLN PERSERO (DARMAWAN PRASODJO):**

Koreksi, 10,5 T Pak, maaf.

**KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-P.NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):**

10,5 T.

Komisi VII sepakat untuk *me-rescheduling* namanya. Menunda untuk naik. Kenapa? Karena masih *oversupply*. Itulah Pak Ramson. Jadi kita bersyukur ya Allah yang tabur kita, bahwa kita intinya, karena memang PLN adalah juga nyawa kita juga. Kalau apa, *bankrupt*, karena juga misalnya tadi ada istilahnya *political appointee*, karena yang punya namanya batang, satu batang dua ini tertutup, eh (*suara tidak jelas...*) batang dua giga itu. Punya Erick Thohir coba itu, sampai ribut sah ya dengan Erick Thohir di pulau sana sama, ditengahi sama Pak Surya Paloh.

Iya, kedua, eh setuju ini ya? Ketok dulu.

**(RAPAT : SETUJU)**

Ini kok saya kok lupa jadi Ketua Komisi VII. Nah itu lah.

2. Komisi VII DPR RI memahami pemaparan Dirut PT PLN terkait dampak Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2021 tentang PLTS Atap terhadap kinerja PT PLN dan akan mengagendakan rapat dengan Kementerian ESDM untuk mendalami Permen tersebut.

Saya kira memang betul apa yang disampaikan PLN. Kalau ini menjadi apa, *micro IBP* ya berat, tetapi kalau Permen ini ditujukan untuk pemanfaatan sendiri saya kira *fair*-lah ya. Titik temunya saya kira di situ dengan juga tidak harus dengan *take or pay* nya kurang lebih 100% itu ya? Kita diangkat, coba nanti kita diskusikan. Ya memang kan kita juga mau sebetulnya bagaimana menjadi usaha yang menarik, tetapi kalau kebablasan ya malah betul-betul habis juga PLN. Mungkin di angka 65, 60, 0, apa? Ya itulah rumusan tadi.

Gitu ya?

Jadi nomor 2 itu kita sama setuju ya?

**(RAPAT : SETUJU)**

3. Komisi VII DPR RI mendorong Dirut PT PLN untuk menjaga ketersediaan tenaga listrik di Indonesia dengan menjaga keamanan pasokan batubara secara berkelanjutan melalui pembentukan PLU serta peningkatan besaran DMO batu bara.

Saya kira ini normatif sekali, karena ini sudah dilakukan ya. Jadi.

**F-P.GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):**

Interupsi Pak Ketua.

**KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-P.NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Iya.

**F-P.GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):**

Kalau ini memang harus dibuat, iya juga soal harga juga, bukan hanya *volume*-nya gitu.

**KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-P.NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Iya, jadi.

**F-P.GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):**

Bukan hanya besaran *volume*.

**KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-P.NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Iya volume, tetapi juga harga.

Saya kira ini juga redaksinya harus dirubah, karena ini sesuatu yang sudah kita jalankan.

**F-P.GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):**

Iya betul, betul Pak.

**KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-P.NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Iya, saya kira di-*drop* saja lah malah ya?

**F-P.GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):**

Iya, iya sudah jalan itu.

**KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-P.NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Iya, ini sudah jalan kok tadi.

Iya, jadi ini.

4. Komisi VII DPR RI mendesak Dirut PT PLN untuk bekerja sama dengan perusahaan otomotif terkemuka guna perkembangan kendaraan listrik Indonesia.

Nah tadi dari Pak Bambang Haryadi, apa *level*-nya, saya kira semua institusi kita akan mendorong ke sana. Mohon maaf, kami juga terinspirasi nih, karena saya kemarin nonton di Mandalika. Bayangkan produsen motor terbesar di dunia dan user terbesar di dunia itu adalah Indonesia, masa kita nonton, pembalapnya orang lain, tapi mereknya? Termasuk misalnya motor GP 2 itu adalah mesinnya dibikin di Bekasi, bayangkan, yang make tapi orang Thailand, kan gitu, yang juara di GP 2.

Nah hal-hal kaya gini saya kira ini, tapi ini hal yang berbeda ya, bahwa penggunaan listrik terus memang kita bagian dari pengendalian konsumsi BBM terus yang kita naik, di mana *listing* kita terus turun karena perubahan riset kita yang terus-menerus habis.

Saya kira ini betul pak ya. Jadi PLN juga harus juga berprakarsa membuat kendaraan listrik.

**(RAPAT : SETUJU)**

Ketok saja pokoknya ya. Saya juga.

5. Komisi VII DPR, maaf.
4. Komisi VII DPR RI mendorong Dirut PT PLN untuk melakukan kajian mendalam. Khususnya terkait penggunaan kompor listrik, sehingga dapat bermanfaat kepada masyarakat.

Saya kira riil saja, ntar dulu Pak Zul, jangan di ini, kita harus tahu, ntar dulu *stop* dulu di anu, kita bicara dulu.

Kita tahu maksudnya, mbok ya ada kompor listriknya kan gitu, yang kita bisa bagi-bagi ke masyarakat, kan gitu. Karena kita mau puasa.

**F-PD (ZULFIKAR HAMONANGAN, S.H.):**

Nomor 3 saja Pimpinan, mungkin sifatnya nggak umum itu. Ditambahin lainnya mungkin. Perusahaan otomotif dan jenis lainnya. Biar bersifat umum. Itu kan khusus tuh hanya otomotif.

**F-P.GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):**

Interupsi.

Kalau maksudnya PLN ikut di industri otomotif sih terlalu jauh. PLN itu menyediakan energi listrik kalau sudah berkembang industri kendaraan listrik. Jadi terlalu jauh.

**F-PD (ZULFIKAR HAMONANGAN, S.H.):**

Iya, dibuat umum saja Pimpinan. Kalau langsung otomotif terlalu.

**KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-P.NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Atau di *drop* saja lah ya? Nggak ada ...

**F-PD (ZULFIKAR HAMONANGAN, S.H.):**

Nah saya rasa di *drop* saja.

**KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-P.NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Nggak ada, di *drop* saja.

Kamu ini ris, membikin begitu.

**DIREKTUR UTAMA PT PLN PERSERO (DARMAWAN PRASODJO):**

Mohon izin Pak, mungkin kami bisa menjelaskan Pak.

**KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-P.NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Iya.

**DIREKTUR UTAMA PT PLN PERSERO (DARMAWAN PRASODJO):**

Bahwa kami mendukung perusahaan otomotif Pak, dengan bagaimana apabila mereka menjual, kami lah yang mendukung, langsung meng-*connect* ke *home charging*-nya Pak, dan itu sudah *on going*. Kemudian kami juga, begitu *home charging*-nya terpasang, kami *connect* ke *server* kami, sehingga ada *internet of things*, dan kami membuat kebijakan, antara jam 10 malam dengan jam 6 pagi ada *discount* 30%. Itu sudah kami lakukan dan sudah berjalan. Kami juga membangun SPKLU, kami juga membangun juga bagaimana ada *franchising* SPKLU dari pihak swasta kerja sama dengan PLN.

Jadi kami mempermudah penggunaan dari perusahaan otomotif berbasis pada listrik itu untuk mengembangkan dan menjualnya, sehingga masyarakat bisa bertransisi secara semu.

Kira-kira begitu Bapak, terima kasih Pak.

**KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-P.NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Iya, saya kira, artinya sudah ya?

**DIREKTUR UTAMA PT PLN PERSERO (DARMAWAN PRASODJO):**

Dalam proses Bapak, kami.

**KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-P.NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Nggak, ini perlu *nggak* dicantumkan ini 3 ini?

**F-PD (ZULFIKAR HAMONANGAN, S.H.):**

Izin Pimpinan, perlu tapi redaksinya mungkin sifatnya umum, jangan khusus otomotif itu.

**F-P.GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):**

Pak Ketua, Pak Ketua.

**KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-P.NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Iya.

**F-PD (ZULFIKAR HAMONANGAN, S.H.):**

Bekerja sama dalam pengembangan seluruh jenis.

**F-P.GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):**

Kalau ini harus dibuat, itu yang didesak itu PLN mempersiapkan sistem ketersediaan energi listrik untuk perusahaan otomotif apa tadi, kendaraan listrik. Untuk pengembangan industri kendaraan listrik. Artinya sudah ada. Ibarat kalau dia ini, BBM nya sudah ada, ini listriknya sudah ada, di mana-mana nanti sistemnya itu sudah ada, gitu. Itu sebenarnya fungsi PLN dalam hal pengembangan kendaraan listrik, bukan ikut *involved* di dalam pengembangan industrinya gitu.

Industri kendaraan listrik, gitu, industri kendaraan listrik. Pengembangan kendaraan, industri kendaraan listrik di Indonesia. Nggak usah lagi, sistemnya saja yang disiapkan. Siapapun yang mengembangkan, sudah ada sistemnya, kan gitu seperti yang dimaksudkan Pak Ketua tadi.

Saya hanya menjabarkan dikit ide originalnya, Pak Ketua.

**DIREKTUR UTAMA PT PLN PERSERO (DARMAWAN PRASODJO):**

Siap Bapak.

**KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-P.NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):**

**(RAPAT : SETUJU)**

Baiklah.

4. Komisi VII DPR RI mendorong DIRUT PT PLN untuk melakukan kajian mendalam terkait pengguna.

Oh sudah ya tadi? Yang intinya dikaji agar cepat bisa hadir di Komisi VII, gitu ya? Nanti jumlahnya berapa-berapa saya kira, iyalah. Nggak, satu kompor listrik berapa sih harganya kira-kira?

**DIREKTUR UTAMA PT PLN PERSERO (DARMAWAN PRASODJO):**

Mohon izin Pak Ketua, itu.

**KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-P.NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Iya, 200.000 kan?

**DIREKTUR UTAMA PT PLN PERSERO (DARMAWAN PRASODJO):**

Sekitar 600 sampai 700 Pak, yang bagus Pak.

**KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-P.NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Loh? Lah yang untuk kompor listrik rakyat itu loh, yang katanya watt-nya rendah dan sebagainya.

**DIREKTUR UTAMA PT PLN PERSERO (DARMAWAN PRASODJO):**

Ada yang 300 sampai 400, ada yang 700 Pak. Kami siapkan Bapak.

**KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-P.NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Iya, disilahkan harga berapapun, tapi yang kalau dipakai oleh rakyat itu tidak tinggi juga watt-nya gitu.

**DIREKTUR UTAMA PT PLN PERSERO (DARMAWAN PRASODJO):**

Siap Bapak.

**KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-P.NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Sudah Pak Zul, aspirasinya sudah cukup. Kami ini mau ngomong terus. Habis ini mau nyebar apa, mau nyebar kangkung di sungai mana gitu? Oh gitu. Ini Pak Zul ini mengingatkan di Swiss, mau apa, nyebar apa? bibit kangkung.

**F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):**

Ketua?

**KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-P.NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Iya?

**F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):**

Mungkin boleh tambah satu usulan apa namanya kesimpulan.

**KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-P.NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Iya, disilakan.

**F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):**

Komisi VII DPR RI mendorong Dirut PT PLN untuk memastikan seluruh, seluruh kontrak yang berkaitan dengan keberadaan NVPPD Indonesia, itu kan ada 5 ya yang dulu disewa dari Turki itu, dapat apa ya bahasanya ya, untuk proses terminasi sampai kemudian tersedia kembali.

**KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-P.NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Iya.

**F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):**

Apa istilahnyalah.

**KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-P.NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Jadi penggantiannya jangan sampai.

**F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):**

Penggantinya itu jangan sampai terjadi defisit listrik. Umumnya itu dia men-*supply* hampir dari 80% di hampir semua kawasan.

**KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-P.NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Iya, jadi Komisi VII DPR RI mendorong Dirut PT PLN untuk memastikan bahwa pasokan listrik tetap berkelanjutan meskipun beberapa apa itu tadi, mitra habis masa kontraknya, kan begitu. Gitu ya?

**F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):**

Iya, tapi maksudnya kepastian untuk peralihan ke yang baru ini Pak, itu yang paling penting.

**KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-P.NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Iya, makanya. Namanya menjamin pasokan listrik itu dengan apa lah, dengan.

**F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):**

Dengan memastikan untuk apa namanya, peralihan.

**KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-P.NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Pengganti ya?

**F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):**

Peralihan ke.

**KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-P.NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Ini karena memang sudah agak lelah ini sejujurnya ini. Kita sudah 4 jam hampir ini malah.

**F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):**

Iya, ke MVP, iya, iya ...*(suara tidak jelas)*...peralihan pasokan listrik dari MVPP yang dikontrak dari Turki, kira-kira gitu lah.

**KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-P.NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Ke sistem lain juga boleh kan? MVPPP ke sistem lain atau sistem sejenis.

**F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):**

Oh iya, ke sistem sejenis atau lainnya.

**KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-P.NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Iya, ke sistem sejenis atau lainnya.

Kan bisa tadi sebagaimana disampaikan dari kapal sudah dibikin oleh dan sebagainya.

Gitu ya Bu? *Anu* ya, saya kira setuju.

**(RAPAT : SETUJU)**

6. Komisi VII DPR RI meminta Dirut PLN untuk menyampaikan jawaban tertulis atas semua pertanyaan Anggota Komisi VII, dan disampaikan ke Komisi VII paling lambat tanggal 28 Maret 2022.

Setuju Bapak/Ibu sekalian ya?

**(RAPAT : SETUJU)**

Baiklah, Bapak/Ibu sekalian,

Hari ini telah kita lakukan dengar pendapat Komisi VII DPR RI dengan Direktur Utama PT PLN Persero membahas berbagai persoalan listrik di Indonesia, dan kita semua bersyukur, rapat dengar pendapat berjalan sangat-sangat produktif, dan semua kita terlibat aktif untuk memikirkan sektor yang memang sangat-sangat strategis ini bagi kepentingan rakyat dan terlebih khusus nantinya adalah bagi kemajuan rakyat selanjutnya.

Baiklah Bapak/Ibu sekalian,

Dengan demikian sebelum kita akhiri kita tutup rapat dengar pendapat ini, saya persilakan kepada yang terhormat saudara Dirut PT PLN untuk menyampaikan semacam *closing statement*.

Dipersilakan yang terhormat.

**DIREKTUR UTAMA PT PLN PERSERO (DARMAWAN PRASODJO):**

Terima kasih.

Bapak Ketua,  
Bapak Pimpinan,  
Para Anggota Komisi VII yang kami hormati,

PLN menghadapi tantangan luar biasa, tetapi kami punya keyakinan, seperti juga dengan krisis batubara di awal tahun. Dengan segala dukungan, arahan, bimbingan dari Pimpinan Komisi VII dan seluruh anggota, dan bersama-sama kita merumuskan strategi yang pas, yang cerdas, tentu saja kami yakin bisa mengubah tantangan ini bisa menjadi suatu kesempatan agar PLN bisa lebih kokoh di masa depan.

Terima kasih.

*Wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakatu.*

**KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-P.NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):**

*Walaikumsalam warrahmatullahi wabarakatuh.*

Baiklah Bapak/Ibu sekalian,

Dengan mengucapkan syukur *alhamdulillah* ke hadirat Allah *subhanahu wa ta'ala*, Tuhan Yang Mahakuasa, maka Rapat Dengar Pendapat Komisi VII

DPR RI dengan Direktur Utama PT PLN dengan segenap jajarannya, saya nyatakan ditutup.

*Billahitaufik wal hidayah,  
Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh.*

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 19.45 WIB)**

a.n. Ketua Rapat  
SEKRETARIS RAPAT,

TTD

**Dra. Nanik Herry Murti**  
**NIP.196505061994032002**